



**KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK PEMERINTAHAN
INDONESIA TAHUN 1958-1998**

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Ziqi Prasetiadi

NIM 160210302073

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK PEMERINTAHAN
INDONESIA TAHUN 1958-1998**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada program studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

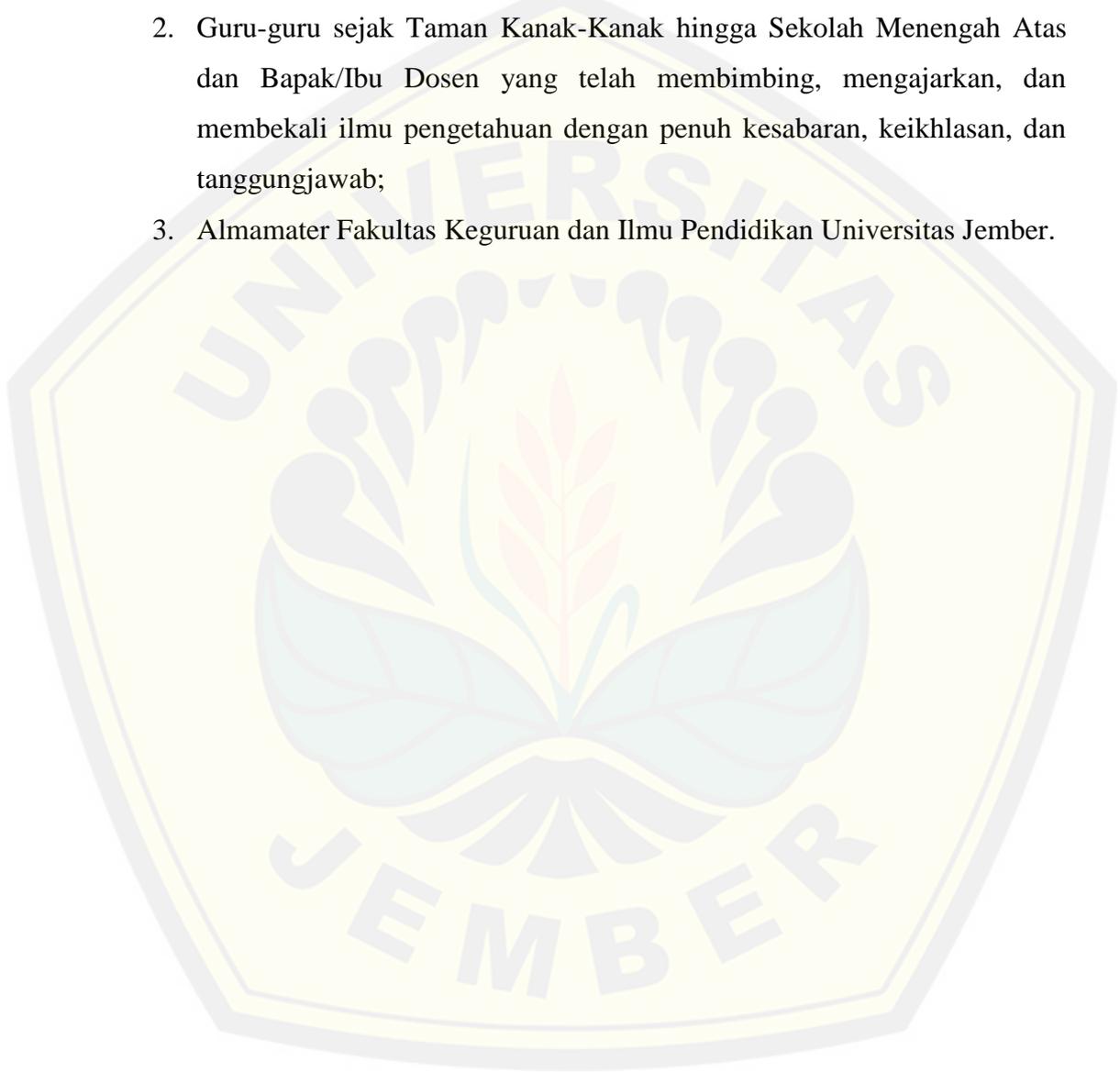
Dimas Ziqi Prasetiadi
NIM 160210302073

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibunda Supiarti dan Almarhum Ayahanda Sumadi tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan untaian doanya;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tanggungjawab;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.



MOTTO

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”

(Abdurrahman Wahid)¹



¹ Abdurrahman Wahid, 2001. <http://nasional.kompas.com>. [Diakses tanggal 21/07/2020]

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ziqi Prasetiadi

NIM : 160210302073

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia tahun 1952-1998.” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,

Dimas Ziqi Prasetiadi
NIM 160210302073

SKRIPSI

**KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK PEMERINTAHAN
INDONESIA TAHUN 1958-1998**

Oleh

Dimas Ziqi Prasetiadi
NIM 160210302073

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan Tahun 1958-1998” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 20 Juli 2020

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M.Hum
NIP. 19600422 198802 1 001

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP. 196005181989021001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurul Umamah, M.Pd
NIP. 19690204419932008

Dr. Mohammad Na'im, M.Pd.
NIP. 19660328 200012 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D.
NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan Indonesia Tahun 1958-1998, Dimas Ziqi Prasetiadi, 160210302073, 2020, xiii + 80; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia berawal dari campur tangan parlemen (sipil) dalam tubuh militer. Pada tahun 1952 terjadi konflik antara Kolonel Bambang Supeno dengan Kolonel A.H Nasution. Nasution selaku KSAD mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. kebijakan Nasution ini dianggap tidak mampu membina suatu semangat korps. Nasution dituduh mengambil keputusan yang memihak dalam kebijaksanaan mengenai personil. Konflik antara Nasution dengan Bambang Supeno menjadi isu politik di lembaga pemerintahan yang memancing munculnya serangkaian mosi tidak percaya. Manai Shopiaan dan mosinya menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Akibatnya militer merasa urusannya dicampuri oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Demonstrasi dilakukan oleh sekitar 35.000 orang tentara. Demonstrasi bergerak ke istana presiden untuk menuntut pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru, serta menuntut untuk segera dilaksanakannya pemilihan umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1) apa yang melatarbelakangi keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia 1958-1998?; (2) bagaimana bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia 1958-1998?; (3) bagaimana dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik pemerintahan dan pertahanan keamanan di Indonesia 1958-1998? Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) untuk menganalisis latar belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998; (2) untuk menganalisis keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998; (3) untuk menganalisis dampak keterlibatan militer dalam stabilitas politik pemerintahan dan pertahanan keamanan di Indonesia tahun 1958-1998.

Metode penelitian yaitu metode historis dengan langkah-langkah (1) Heuristik, (2) Kritik (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Manfaat dari penelitian ini sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulisan ilmiah, latihan berpikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1952-1998.

Hasil penelitian adalah militer memiliki kesempatan yang kuat untuk masuk dunia politik sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Beberapa peristiwa sebagai pendorong AD masuk politik muncul seperti Peristiwa 3 Juli 1946, Peristiwa 17 Oktober 1952. Di legitimasinya gagasan atau konsep “Jalan Tengah” Nasution oleh Presiden Soeharto menjadi doktrin Dwifungsi ABRI yang nantinya semakin memperkuat peranan militer dalam bidang politik. Dampak dari keterlibatan militer terhadap stabilitas politik nasional, pertahanan dan keamanan Negara adalah pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina disebabkan oleh pandangan militer (antikomunis). Militer memandang Cina sebagai pihak yang dianggap turut terlibat dalam peristiwa G30S.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan militer merasa berhak ikut serta dalam menjalankan pemerintahan karena jasanya dalam Revolusi Kemerdekaan, campur tangan parlemen yang ingin me-reorganisasi militer sehingga terjadi demonstrasi oleh golongan militer pada 17 Oktober 1952, dan saat pemerintah memberlakukan UU Darurat Perang yang memberikan kesempatan bagi militer untuk berperan lebih jauh dalam urusan pemerintahan. (2) Bentuk keterlibatan militer dibagi menjadi dua periode yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan pada masa pemerintahan Soeharto. kedua periode itu militer masuk dalam politik pemerintahan menduduki jabatan kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan. (3) Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik pemerintahan dan pertahanan keamanan Indonesia pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Militer menduga Cina turut terlibat dalam peristiwa G30S.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan Indonesia Tahun 1958-1998”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

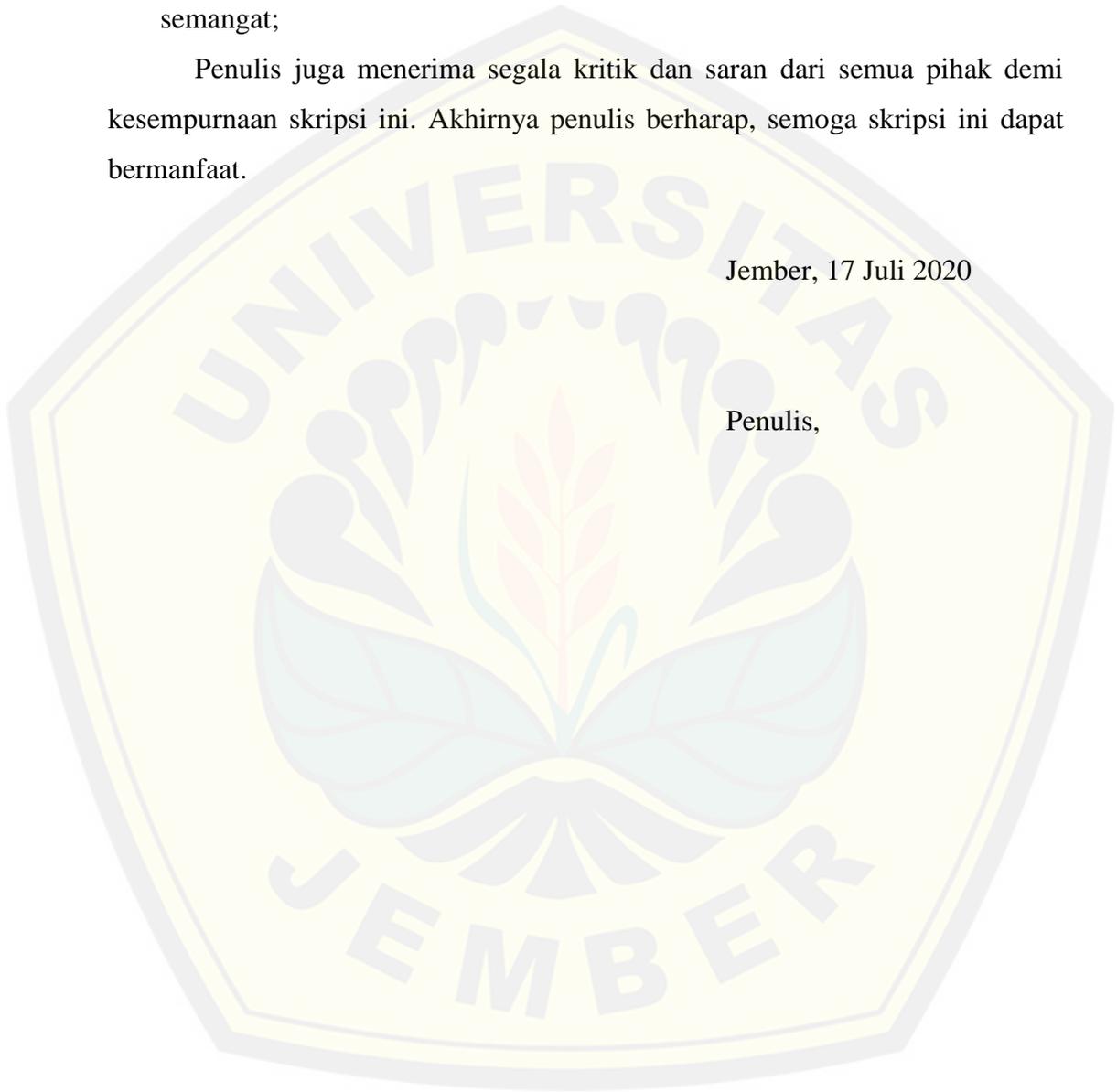
1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M. Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga Drs. Marjono, M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Umamah, M. Pd. dan Dr. Mohammad Na'im, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan bekal ilmu selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah banyak membantu penulisan selama studi;
8. Keluarga besar Bapak Almarhum Sumadi, Ibu Supiarti, dan Eka Surya Prasetiadi yang telah memberikan dukungan dan do'anya demi terselesaikannya skripsi ini;

9. Sahabat tercinta Cahya Muhammad, Agus Danu, David Hidayah, Dwi Kristanti, Nurma Helani dan Kartika Aprilia.
10. Sahabat-sahabatku Shohib, Yulius, Holil, dan Chilviya, serta semua teman-teman pendidikan sejarah 2016 yang selalu memberikan dorongan semangat;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 Juli 2020

Penulis,



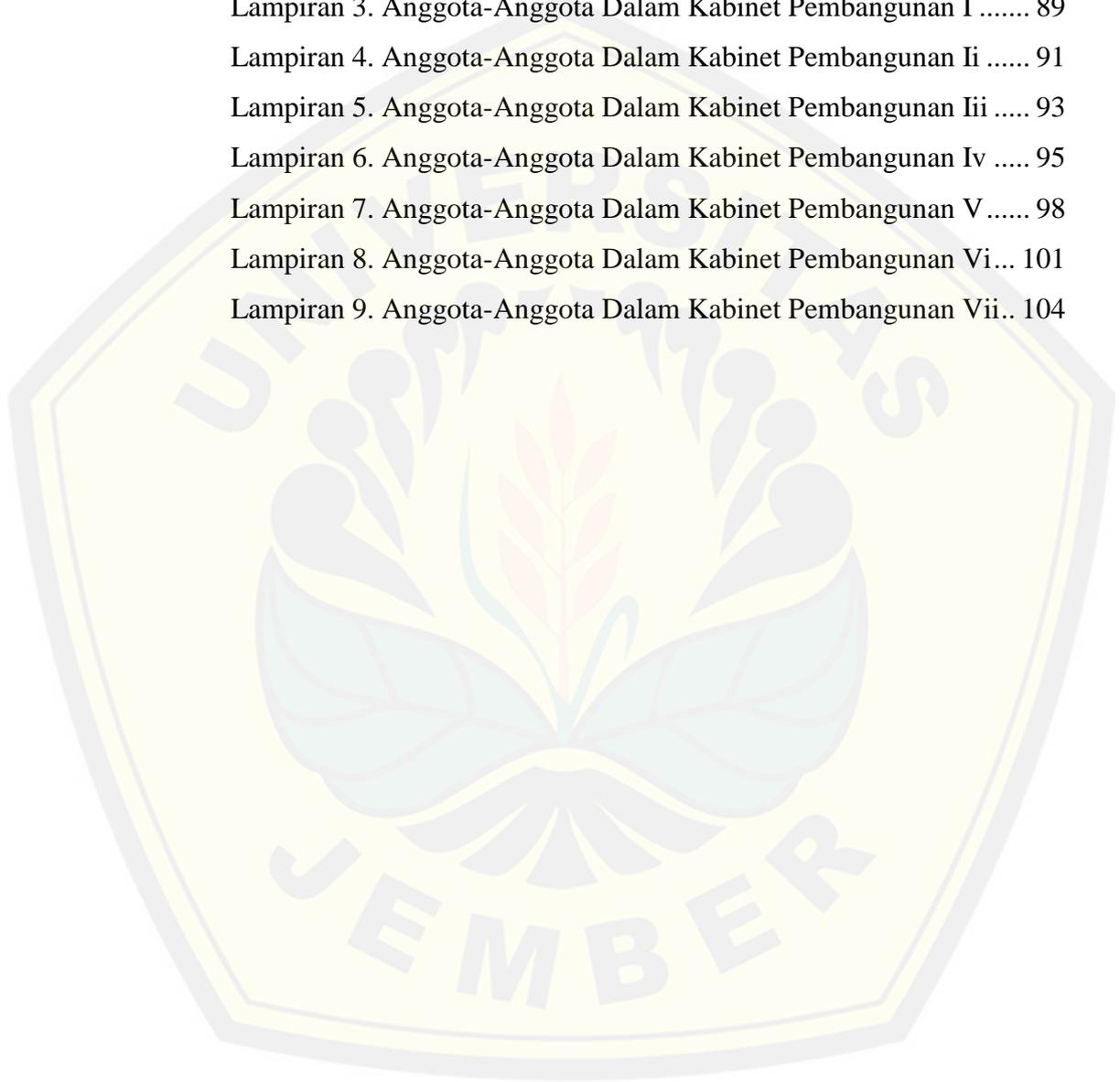
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Judul.....	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	18
BAB 4. LATAR BELAKANG KETERLIBATAN MILITER DALAM	
 POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA 1958-1998	26
4.1 Peran Militer dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-	
1949	26
4.2 Reaksi terhadap Campur Tangan Sipil dalam Tubuh Militer.....	31
4.3 Diberlakukannya Undang-undang Darurat Perang (S.O.B)	
1957	35
BAB 5. BENTUK KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK	
 PEMERINTAHAN DI INDONESIA 1958-1998	40

5.1 Konsep Jalan Tengah Nasution sebagai Dasar Pijakan Militer Terjun dalam Dunia Politik.	40
5.2 Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1959- 1965	42
5.2.1 Kabinet	43
5.1.2 Badan Legislatif.....	45
5.1.3 Jabatan Strategis	47
5.2 Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1966- 1998	52
5.2.1 Kabinet	52
5.2.2 Badan Legislatif.....	55
5.2.3 Jabatan Strategis	59
BAB 6. DAMPAK KETERLIBATAN MILITER TERHADAP STABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN KEAMANAN DI INDONESIA 1958-1998.....	66
6.1 Stabilitas Politik Pemerintahan.....	66
6.1.1 Politik Dalam Negeri.....	66
6.1.2 Politik Luar Negeri.....	70
6.2 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.....	72
BAB 7. PENUTUP.....	77
7.1 Simpulan.....	77
7.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Penelitian	83
Lampiran 2. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Dwikora	84
Lampiran 3. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan I	89
Lampiran 4. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan Ii	91
Lampiran 5. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan Iii	93
Lampiran 6. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan Iv	95
Lampiran 7. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan V	98
Lampiran 8. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan Vi...	101
Lampiran 9. Anggota-Anggota Dalam Kabinet Pembangunan Vii..	104



BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan yang meliputi; (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian.

1.1.Latar Belakang

Lembaga militer adalah suatu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negeri. Militer merupakan unsur penting dalam sebuah negara yang berfungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman musuh yang berasal dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Kekuatan militer juga menjadi suatu tanda kehormatan atau kewibawaan sebuah negara dalam kancah internasional. Akan tetapi, mengatur hubungan politik pemerintahan dan militer tidak mudah dalam mengelola batas antara keduanya. Militer ada kecenderungan ingin ikut berkecimpung dalam dunia politik agar bisa menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Di sisi lain otoritas sipil berkeinginan untuk mengendalikan militer secara bersamaan (Rizal, 1999: 13).

Pada masa peralihan kekuasaan di akhir tahun 1945, militer secara resmi menerima asas keunggulan kekuasaan sipil. Para petinggi militer beranggapan bahwa peranan militer dalam bidang politik sewaktu-waktu diperlukan akan tetapi tidak muncul sebagai kekuatan politik yang utama. Namun, seiring dengan semakin melemahnya kehidupan politik yang disebabkan oleh sistem parlementer, telah memperkuat alasan militer untuk campur tangan didalam kehidupan politik. Militer menganggap memiliki beban tanggung jawab untuk menguatkan kembali kehidupan politik di Indonesia. Situasi ini dimanfaatkan oleh pimpinan militer untuk mengumumkan keadaan darurat perang, yang pada akhirnya secara perlahan memungkinkan para perwira militer mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik dan ikut serta dalam perkembangan politik (Crouch, 1986: 22).

Perkembangan politik di Indonesia pada awal kemerdekaan tidak bisa terlepas dari peranan militer didalamnya. Militer dalam mengawal pemerintah pada waktu itu ditanggapi positif oleh kebanyakan masyarakat. Masyarakat menilai dalam situasi yang belum mapan selepas kemerdekaan, sebuah negara

memerlukan suatu kekuatan yang solid yang mampu menjadikan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Oleh karena itu bergabungnya para elit militer di pemerintahan dianggap wajar oleh kebanyakan masyarakat. Di Indonesia politik militer telah dipraktikkan sejak awal kemerdekaan. Ketika Belanda melakukan agresi militer yang kedua, Soekarno memerintahkan kepada tentara melalui Jenderal Sudirman untuk tetap bertahan di kota Yogyakarta sebagai suatu keputusan politik. Akan tetapi tentara mengambil langkah meninggalkan kota untuk melakukan perang gerilya. Setelah tertangkapnya Soekarno dan Hatta oleh Belanda, militer mengambil alih peran politik. Militer secara aktif mengambil keputusan-keputusan politik untuk menghadapi agresi militer Belanda kedua. Perjuangan menghadapi agresi militer Belanda membuat militer mendapatkan legitimasi oleh masyarakat Indonesia untuk ikut campur dalam masalah politik (Samego, 1998: 104).

Militer berhasil menahan gempuran Belanda dalam agresi militer I dan II yang semata-mata ingin merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Akan tetapi militer Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Keberhasilan dalam mempertahankan kemerdekaan inilah yang menjadikan awal keterlibatan militer Indonesia dalam perannya di bidang politik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan keseluruhan, tidak hanya bertempur akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949. Melalui peristiwa ini militer memiliki alasan kuat untuk ikut terlibat dalam perpolitikan di Indonesia (Soebijono, 1992: 18).

Keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia semakin terlihat saat terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dipicu oleh mosi Manai Shopiaan yang berencana untuk mereorganisasi TNI menjadi tentara Indonesia yang profesional. Rencana ini didukung oleh Menteri Pertahanan Hamengkubuwono, namun ditentang oleh kolonel Bambang Supeno. Pada bulan juli 1952 Bambang Supeno mendesak presiden Soekarno untuk mengganti Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H Nasution. Konflik intern Angkatan Darat menjadi sorotan parlemen komisi pertahanan sehingga masalah ini menjadi isu politik yang memancing munculnya serangkaian mosi di parlemen. Berbagai

mosi ini menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer (Sundhahussen, 1986: 117). Oleh karena itu militer merasa urusannya terlalu dalam dicampuri oleh orang non-militer (sipil). Dengan demikian sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Demonstrasi dilakukan oleh sekitar 35.000 orang tentara kemudian bergerak ke istana presiden untuk menuntut pembubaran parlemen dan segera dilaksanakannya pemilihan umum. Hal ini merupakan awal keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia.

Kedudukan militer semakin kuat dalam politik pemerintahan setelah disahkannya UU Darurat Perang atau Staat van Oorlog (SOB) tahun 1957. SOB merupakan inisiatif dari KSAD A.H Nasution yang disetujui oleh presiden Soekarno. SOB diterapkan mengingat situasi dan kondisi negara kacau akibat aksi separatis yang terjadi di berbagai daerah seperti dibentuknya Dewan Banteng dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Pengesahan UU Darurat Perang atau SOB memberikan kesempatan bagi kalangan militer untuk bertindak dan mendominasi kondisi politik pemerintahan, bahkan melampaui parlemen. Pada tahun 1958 Jenderal Nasution mengatakan kepada Soekarno bahwa militer ingin melanjutkan peran itu setelah UU Darurat Perang dicabut. Jenderal Nasution mengembangkan Konsep “Jalan Tengah” yang memberikan peluang pada militer untuk berperan dalam politik pemerintahan sekaligus memperluas fungsi militer sebagai kekuatan sosial politik (Crouch, 1986: 22).

Perkembangan fungsi militer sebagai kekuatan sosial politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir dan tumbuhnya militer itu sendiri. Militer mempunyai peran besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. militer lahir bersama-sama dengan meletusnya revolusi kemerdekaan. Konsep jalan tengah yang nantinya tumbuh menjadi doktrin Dwifungsi ABRI menjadi alat untuk mempermudah militer untuk mengintervensi perpolitikan di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Doktrin tersebut merupakan suatu konsep politik yang menempatkan militer baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik (Soebijono, 1992:3).

Menjelang runtuhnya rezim orde baru, banyak kritikan mengenai campur tangan militer dalam politik pemerintahan dari mulai warga sipil hingga dari dalam tubuh militer (TNI) itu sendiri. Hal ini diatandai dengan semakin beraninya para perwira TNI menyuarakan tentang peninjauan ulang doktrin Dwifungsi, seperti para purnawirawan Jendral Soemitro dan bahkan Jendral A.H. Nasution, selaku peletak dasar Dwifungsi. Menurut Nasution kondisi doktrin dwifungsi semakin menyimpang dari arah semula.

Uraian diatas merupakan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan Indonesia tahun 1958-1998. Adanya campur tangan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia 1958-1998 yang pada saat ini sudah tidak terlihat kembali, sehingga hal tersebut menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian . Alasan kedua, Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia dipilih karena pada tahun 2019 banyak isu tentang kembalinya Dwifungsi TNI. Bahkan Robertus Robert yang merupakan Dosen UNJ ditangkap setelah mengkritik TNI di aksi kamisan pada 7 Maret 2019. Sehingga penulis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998 dan menuangkannya dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

Penelitian Ini dianggap penting karena militer turut bermain dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Militer pada era Orde Baru begitu kuat berperan dan mewarnai jalannya kehidupan politik. Keberadaan Dwi Fungsi ABRI merupakan bukti nyata adanya campur tangan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menganggap keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1952-1998 penting untuk diungkapkan agar mencapai kajian Sejarah Ilmiah dan menambah pengetahuan dalam historiografi nasional. Maka peneliti memilih judul **“Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998.”**

1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan hal penting untuk menghindari terjadinya salah persepsi dan penafsiran mengenai penelitian ini. Penelitian ini mengambil

judul, yaitu “ Keterlibatan Militer Dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998.”

Menurut Setiadi (2005:115), keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi atau kelompok yang dirasakan dan dibangkitkan oleh stimulus didalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya. Pada penelitian keterlibatan berkaitan dengan suatu tindakan keikutsertaan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam suatu permasalahan. Dari penjelasan diatas militer ikut serta dalam urusan politik di Indonesia bahkan sampai memegang kendali dalam mengatur jalannya sebuah pemerintahan.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur (Sjarif, 1996: 1). Militer juga menjadi tanda suatu kehormatan atau kewibawaan sebuah negara dalam kanca internasional semakin kuat kekuatan disuatu negara maka akan semakin disegani negara tersebut oleh negara-negara lain.

Politik adalah masalah kekuasaan yang mempunyai model atau pola yang mengandung sifat otoritas (Duverger, 1998: 6). Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan di dalam suatu negara. Selain itu juga politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Pemerintahan adalah pelaksanaan tugas yang mencakup alat kelengkapan negara seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif (Manan, 2001:101). Pada penelitian ini pemerintahan meliputi kabinet, legislatif/DPR/MPR, dan Jabatan Strategis yang meliputi kepala pemerintah daerah seperti gubernur serta badan-badan yang dibentuk oleh negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan uraian diatas yang terkandung dalam judul “ Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998” adalah campur tangan militer dalam menjalankan politik pemerintahan di Indonesia. melalui personilnya menduduki jabatan-jabatan politik seperti di kabinet, legislatif/DPR/MPR, dan Jabatan strategis lainnya pada tahun 1958-1998.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Sebagai usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan fokus permasalahan yang dikaji, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup masalah yang ada, baik dalam ruang lingkup tempat (spasial) dan ruang lingkup waktu (temporal).

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan Peran Militer Dalam Perpolitikan di Indonesia. Karena peristiwa yang terjadi ini di Indonesia maka tempat yang difokuskan dalam penelitian ini adalah di Indonesia.

Ruang lingkup waktu dalam hal ini dibatasi antara tahun 1958-1998. Tahun 1958 dipilih karena merupakan awal keterlibatan militer dalam politik pemerintahan ditandai dengan disampaikannya gagasan atau konsep “Jalan Tengah” Jenderal A.H Nasution dihadapan taruna Akademi Militer Nasional. Dalam pidatonya, Nasution mengatakan bahwa tidak ingin Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti prajurit Amerika Latin yang menjadi kekuatan politik, dan juga tidak menginginkan meniru model Eropa dimana tentara menjadi alat mati pemerintah. Peristiwa tersebut menjadi awal bagi militer yang nantinya menjalankan dua fungsi utama, yaitu menjaga keamanan pertahanan negara (Hankam), dan memegang kekuasaan serta mengatur jalannya pemerintahan Indonesia. Tahun 1998 dipilih sebagai akhir penelitian karena pada tahun ini banyak tuntutan dari masyarakat Indonesia agar pemerintah melakukan penghapusan peran sosial-politik militer yang dianggap kurang profesional karena sering berperan dalam politik dibandingkan dalam menjalankan peran utamanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (HanKam). Puncaknya muncul gerakan mahasiswa yang menuntut penghapusan angkatan bersenjata dari politik segera mungkin. Sehingga pada bulan Oktober 1998 Wiranto selaku Kepala Staf Angkatan Darat secara bertahap mengurangi peran militer dalam bidang politik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia 1958-1998?
2. Bagaimana Bentuk Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia 1958-1998?

3. Bagaimana Dampak Keterlibatan Militer Terhadap Stabilitas Politik Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan di Indonesia 1958-1998?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Menganalisis Bagaimana Latar Belakang Keterlibatan Militer Terhadap Politik Pemerintahan di Indonesia 1958-1998.
- 2) Untuk Menganalisis Bentuk Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia 1958-1998.
- 3) Untuk Menganalisis Dampak Keterlibatan Militer Terhadap Stabilitas Politik Pemerintahan dan Pertahanan Keamanan di Indonesia 1958-1998.

1.6 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulisan ilmiah, latihan berpikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998.
- 2) Bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998.
- 3) Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Dharma penelitian; Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Subyek dalam penelitian ini adalah keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam penelitian sejarah merupakan sebuah peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan keterlibatan militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998. Berbagai penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan intervensi militer dalam perpolitikan di Indonesia dikaji untuk menjadi acuan pendukung, penguat, dan pembenaran terhadap data yang ditemukan. Beberapa karya ilmiah tersebut baik berupa buku, jurnal-jurnal internasional maupun nasional, dan skripsi. Disamping itu akan dikemukakan juga pendekatan maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sejumlah teori yang dipaparkan bermanfaat juga sebagai alat pengurai untuk membedah setiap persoalan secara kronologis dan dialektik.

Pembahasan mengenai Keterlibatan Militer dalam perpolitikan di Indonesia telah dikaji dalam tulisan. Yang pertama sebuah skripsi dari Hadi Nafis Kamil (2009) yang berjudul "*Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan di Indonesia 1945-1998*" menjelaskan mengenai peran militer dalam kehidupan politik masih tetap dominan, meski kepala negara orang sipil, apalagi jika para militer di partai-partai politik "bermain mata", maka militer tetap akan mengendalikan kehidupan politik di suatu negara. Munculnya satgas-satgas (satuan tugas) di partai-partai politik sebenarnya dapat ditengarai, budaya militer tetap besar dan mengakar kuat dalam kehidupan politik kita. Merebaknya budaya militer dalam kehidupan partai politik, akan merusak kehidupan partai politik, dan menjadi pemicu munculnya komunalisme, dimana partai politik selalu mengandalkan pengarahan massa guna melakukan tekanan politik. fakta bahwa militer merupakan kekuatan yang menentukan dalam jagat perpolitikan adalah realitas yang tidak bisa ditolak siapapun. Buktinya kejatuhan presiden Soekarno karena bersebrangan dengan militer, sehingga jenderal soeharto menggantikannya, dan jendral Soeharto pun lalu jatuh, karena militer menarik dukungan darinya. Pada akhir tahun 1950-an ilmuwan politik barat menanggapi bahwa peranan militer yang memilih peran dalam bidang pemerintahan demokrasi barat akan memberikan kontribusi positif terhadap

pembangunan politik di negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Banyak negara-negara dunia yang mencoba sistem demokrasi dengan berlandaskan pada model yang terdapat di barat, senantiasa akhirnya melahirkan rezim otoritarian yang dimana pihak militer turut serta bermain didalamnya.

Penelitian terdahulu ini memfokuskan bagaimana militer sangat dominan dalam kancah perpolitikan di Indonesia walaupun kepala negara dipegang oleh sipil, sehingga peneliti mencari celah dari penelitian terdahulu dengan mengkaji lebih dalam keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1952-1998. Dimana peneliti membahas dan memfokuskan penelitian tentang awal militer terlibat dalam politik pemerintahan serta militer menjadi kekuatan sosial politik hingga efek atau dampak terhadap kestabilan politik dan pertahanan dan keamanan negara. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bahasannya tentang dominasi kekuatan militer dalam pemerintahan di Indonesia.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Kornelis Rikan (2014) dalam skripsi yang berjudul *“Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998”* yang menjelaskan konsep Dwifungsi ABRI mengemban dua fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (Hankam), dan fungsi kekuatan sosial politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis disegala aspek kehidupan bangsa dan bernegara dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional berlandaskan Pancasila. Lahirnya konsep Dwifungsi ABRI adalah sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik dibidang Hankam negara maupun dibidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di bawah kepemimpinan Soeharto peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik sejak 1965 dapat dilihat dalam empat bidang utama, yakni sebagai stabilisator, sebagai dinamisator, sebagai pelopor dan sebagai pelaksana sistem perubahan demokrasi, dengan dalih “Militer” profesional, dimana militer diletakkan sebagai suatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdian kepada masyarakat dan negara. ABRI ikut andil menentukan kebijakan-kebijakan negara

dan dengan demikian mesti secara formal diakui dan diposisikan sebagai kekuatan sosial politik. Maka militer Indonesia menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk di DPR.

Penelitian yang ditulis Kornelis Rikan ini lebih banyak menjelaskan tentang konsepsi ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik yang , budaya militer tetap besar dan mengakar kuat dalam kehidupan politik. walaupun dalam pemaparannya menjelaskan mengenai fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial dan politik akan tetapi penulisan terdahulu ini lebih mengarah ke dampak terhadap stabilitas nasional saja. Oleh karena itu peneliti mengambil celah dari tulisan ini yaitu mengkaji faktor yang mendorong militer nantinya menjadi kekuatan sosial politik serta dampak dari keterlibatan militer dalam politik pemerintahan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia pada tahun 1958-1998.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ervina Juliani (2008) dalam skripsi yang berjudul “*Militer Dan Politik (Studi Tentang Kelompok Pendukung Dan Penentang Terhadap Penghapusan Dwi Fungsi ABRI Tahun 1998-2001)*” Menjelaskan mengenai militer sebagai kekuatan sosial politik pada masa Orde Baru telah memainkan perannya yang dominan dalam arena politik. Militer menggunakan doktrin Dwi Fungsi sebagai usaha untuk memperluas peranannya dalam bidang-bidang lainnya atau diluar Hankam. Dalam perjalanan peran sosial politik ABRI, konsep Dwi Fungsi dan implementasinya seolah-olah menjadi sesuatu yang sakral. Kedudukan ABRI sebagai kekuatan sosial politik telah banyak menimbulkan dampak negatif dan distorsi dalam pelaksanaannya. Dwi Fungsi ABRI kemudian hanya menjadi alat bagi perluasan peran militer diluar bidang militer. Hal ini kemudian memiliki dampak yang luas, karena peranan ABRI mencakup berbagai aspek kehidupan tanpa ruang yang cukup jelas, sehingga menimbulkan berbagai fungsi yang tumpang tindih dalam penyelenggaraan negara yang membuat tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawaban sulit dan tidak jelas.

Pada masa akhir Orde Baru suara-suara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah umumnya. Dan terhadap dominasi militer yang dianggap sebagai alat pemerintah khususnya semakin kuat, yang pada akhirnya bergulir kepermukaan dengan gelombang yang semakin membesar dan tidak terhindarkan

dalam bentuk gerakan reformasi. Seiring berjalannya waktu, dan setelah terjadi krisis ekonomi dan politik yang berlanjut pada krisis kepercayaan, muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan membawa dampak terhadap jauhnya kursi kepemimpinan Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, maka berakhir pula pemerintahan Orde Baru karena Soeharto dianggap sebagai personifikasi Orde Baru. Pasca Orde Baru, juga ditandai dengan terpisahnya lembaga kepolisian dari ABRI yang merupakan langkah awal menuju militer profesional. Tanggung jawab reformasi tubuh TNI diikuti dengan gerakan kembalinya militer ke barak, menandakan era militer dalam politik sudah ditinggalkan. Tidak ada lagi pemberian jatah kursi khusus di legislatif untuk militer, tidak ada lagi hak istimewa. Militer hanyalah orang biasa yang direkrut negara, dilatih dan dipersenjatai untuk menjaga kehormatan bangsa dan negara.

Penelitian yang ditulis oleh Ervina Juliani ini lebih kearah militer menggunakan doktrin Dwifungsi ABRI untuk memperluas peranannya dalam bidang-bidang diluar Hankam. Selain itu juga dalam penelitian ini juga membahas tentang keinginan masyarakat untuk reformasi dalam tubuh militer itu sendiri (Penghapusan doktrin Dwi Fungsi) karna dianggap hanya sebagai alat untuk memperkuat pemerintah. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini belum menjelaskan tentang awal atau dorongan militer untuk ikut serta dalam politik pemerintahan hingga nantinya melahirkan doktrin Dwifungsi ABRI yang dijadikan alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam politik pemerintahan di Indonesia.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Andreas Lantik (2014) dalam skripsi yang berjudul "*Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Pemerintahan Orde Baru.*" Menjelaskan tentang keikutsertaan kalangan militer dalam pemerintahan demokrasi yang seharusnya dikendalikan oleh golongan sipil sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi kalangan militer itu sendiri. Hal yang sama pernah terjadi ketika di awal kemerdekaan ketika para pemimpin BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang seharusnya hanya bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum juga turut merangkap jabatan menjadi anggota KNI (Komite Nasional Indonesia) yang

menangani masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial-budaya, dimana seharusnya posisi tersebut merupakan tanggung jawab kalangan sipil meskipun pada masa itu BKR bukanlah tentara yang bersifat reguler dan situasi itu tercipta sebagai akibat desakan revolusi itu sendiri. Rekam jejak keterlibatan golongan militer dalam sistem pemerintahan memang sudah ada jejak lama bahkan sebelum militer itu sendiri secara resmi terbentuk. Kondisi yang demikian terus berlanjut sejak masa pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno hingga masa Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Proses melibatkan diri yang dilakukan oleh kalangan militer kedalam pemerintahan cenderung berbeda di setiap masanya. Pada masa presiden Soekarno, golongan militer hanya memanfaatkan kedekatan personal antara para pemimpinnya dengan sang presiden untuk memperoleh jabatan-jabatan sipil yang bersifat vital jika dilihat secara kepentingannya. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto, golongan militer bahkan lebih berani dalam melibatkan dirinya kebidang politik dengan mempopulerkan Dwifungsi ABRI sebagai alat untuk memperluas perannya diluar bidang militer.

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan tinjauan pustaka karena memiliki sedikit kesamaan dengan topik penelitian yang penulis kaji. Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan penelitiannya mengenai keikutsertaan kalangan militer dalam pemerintahan yakni dengan menempatkan golongan militer yang nantinya menjadi alat pendukung bagi pemerintahan orde baru dalam mendominasi kekuatan politik. Sedangkan bentuk-bentuk campur tangan militer dalam politik pemerintahan belum banyak dibahas oleh peneliti. sehingga penulis mengambil celah untuk lebih memperdalam bagaimana bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan serta dampaknya bagi kestabilan politik dan pertahanan serta keamanan negara Indonesia.

Adapun sumber dari jurnal nasional maupun internasional, seperti karya Harold Crouch yang berjudul "*Military and Politics*" menjelaskan bahwa dalam sebuah negara pasti memiliki semacam kekuatan militer untuk perlindungan terhadap musuh dari luar, untuk prestise internasional, dan seringkali untuk menjaga ketertiban internal. Hubungan antara kehidupan politik suatu negara dan militernya merupakan masalah mendasar yang dihadapi oleh suatu negara.

Masalahnya dapat dipahami sebagai masalah mengelola batas antara mereka. Otoritas sipil berkeinginan untuk mengendalikan militer secara bersamaan, militer lebih efektif ketika mereka diprofesionalkan, yang membutuhkan otonomi substansial dan penetrasi sipil minimal dalam operasi internal mereka. Demokrasi modern telah mencapai solusi yang lebih efektif dalam hal ini daripada negara-negara berkembang. Baik mekanisme kelembagaan dan norma-norma politik berkontribusi pada pengelolaan batas antara militer dan politik.

Jurnal yang ditulis Harold Crouch ini membahas mengenai masalah batasan antara militer dan politik di suatu negara, dimana otoritas sipil berkeinginan untuk mengendalikan militer secara bersamaan, sedangkan militer ingin menduduki jabatan-jabatan penting diperpolitikan Indonesia dan turut andil dalam menjalankan roda pemerintahan. Penelitian terdahulu disini tidak menjelaskan atau mengkaji lebih dalam tentang faktor –faktor atau dorongan militer untuk ikut serta dalam politik pemerintahan serta bentuk-bentuk keterlibatan militer dan dampaknya bagi pemerintah. sehingga ini menjadi celah bagi penulis untuk mengkaji bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan sekaligus dampak yang ditimbulkan.

Dalam jurnal *Politic Under Military Indonesia's New Order*. Karya Harold Crouch menjelaskan tentang perkembangan politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari peranan militer didalamnya, peran militer dalam bidang politik pada waktu itu ditanggapi positif oleh kebanyakan masyarakat. Mereka menilai dalam situasi yang belum mapan selepas kemerdekaan, perlu adanya suatu kekuatan yang solid yang mampu menjadikan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Intervensi militer dalam bidang politik di Indonesia mulai terlihat sejak pasca kemerdekaan dan ditanggapi secara positif oleh kebanyakan masyarakat. Masyarakat menilai dalam situasi yang belum mapan selepas kemerdekaan, perlu adanya kekuatan yang solid untuk dapat mempersatu bangsa Indonesia ini, namun intervensi militer dalam perpolitikan di Indonesia ini mulai digagas lebih dalam kembali pada tahun 1958 dengan istilah Konsep “Jalan Tengah” yang nantinya pada masa pemerintahan Soeharto dikenan dengan istilah doktrin Dwifungsi ABRI.

Jurnal yang ditulis Harold Crouch dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki keterkaitan sekaligus perbedaan dalam beberapa aspek yang

dikajinya. Keterkaitan tulisan Harold Crouch dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia yang tidak bisa terlepas dari peranan militer didalamnya. Dimana militer menganggap banyak berjasa dalam revolusi kemerdekaan sehingga tidak ingin dikesampingkan perannya dalam bangsa ini. Selain itu pula akibat adanya campur tangan sipil dalam kubuh militer membuat militer pun ingin mencampuri urusan yang seharusnya dilakukan oleh sipil seperti dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yakni peneliti terdahulu tidak menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan Indonesia beserta dampak yang ditimbulkan dalam kestabilan politik pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan negara.

Dalam jurnal *Professionalism in the post Soeharto Indonesian Military*. Karya Murhadi menjelaskan bahwasanya TNI memiliki kehadiran yang berpengaruh dan memainkan peran penting di Republik Indonesia selama rezim Orde Baru Soeharto. TNI, bersama dengan Partai Fungsional (Partai Golongan Karya, GOLKAR) dan birokrat pemerintah, merupakan bagian integral dari Rezim Orde Baru Soeharto dan dikenal sebagai ABG (ABRI 3, Orde Baru Soeharto dan dikenal sebagai ABG (ABRI 3, Golkar dan Birokrasi 4). TNI menjabat sebagai garda depan Rezim Orde Baru Soeharto selama 32 tahun. Pengaruh TNI dibuat Golkar dan Birokrasi. Pengaruh TNI dibuat lebih kuat karena kebijakan Soeharto yang mengambil keuntungan dari jaringan TNI.

Penelitian yang ditulis Murhadi ini membahas mengenai pengaruh serta peranan TNI didalam partai-partai politik pada masa orde baru. Dimana Militer lebih khususnya TNI menjadi kekuatan sosial politik sehingga partai-partai yang diusung oleh militer akan menjadi sangat kuat dalam persaingannya dengan partai lain yang tidak diusung atau didukung militer didalamnya. Sehingga partai yang didalamnya mendapat dukungan oleh militer begitu mudah untuk mendominasi dan menang dari partai-partai lain. Sedangkan faktor yang menyebabkan militer memiliki peran didalam partai-partai politik serta dampak peranan militer didalam partai politik terhadap kestabilan politik pemerintahan serta pertahanan dan keamanan belum dijelaskan sehingga hal ini menjadi celah bagi penulis untuk dikaji lebih dalam lagi.

Dalam jurnal *The Political of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Karya Marcuz Meitzer menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru sampai jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah meluncurkan sejumlah inisiatif untuk mereformasi angkatan bersenjata sebelumnya mahakuasanya. Sejauh mana reformasi ini telah mengakibatkan perubahan politik yang nyata, bagaimanapun, telah dikenakan perdebatan sengit di Indonesia dan di ibukota negara-negara donor Barat. Kedua kubu sering maju rekening yang sangat antagonis dari proses reformasi militer. Kelompok hak asasi manusia dan aktivis politik, di satu sisi, telah berpendapat bahwa meskipun reformasi formal, telah ada hampir tidak ada perubahan dalam cara angkatan bersenjata beroperasi. Mereka mempertahankan bahwa militer terus mempengaruhi, dan bahkan urusan mendominasi, politik dan ekonomi.

Penelitian yang ditulis Marcuz Meitzer ini membahas mengenai dominasi militer dalam bidang politik di Indonesia. Kekuatan militer dalam politik pemerintahan dibuktikan seminar angkatan bersenjata dibandung pada tahun 1966 yang memutuskan peranan militer dibidang politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Bahkan kelahiran partai golkar merupakan bagian dari pembesaran peran politik militer. Oleh karena itu partai golkar nantinya sangat mendominasi perpolitikan di Indonesia dibandingkan partai-partai lainnya. Sedangkan tulisan mengenai efek atau dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekuatan militer dalam politik pemerintahan belum dijelaskan oleh peneliti. Sehingga ini menjadi celah bagi penulis untuk mengkaji dampak dari peranan kekuatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia terhadap kestabilan politik serta pertahanan dan keamanan negara.

Proses rekontruksi sejarah membutuhkan metode pendekatan dan teori yang berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan berbagai masalah yang terkait dalam peristiwa sekaligus untuk mengaitkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Sehingga terbentuk suatu pembangunan yang utuh. Di dalam penulisan sejarah memerlukan kerangka teori sebagai dasar pemikir yang dipakai dalam melakukan analisis (Kartodirjo, 1993:2)

Dalam upaya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada, dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologi Politik. Pendekatan sosiologi politik ini mengkaji ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam sebuah lapisan masyarakat dan masyarakat nasional. Objek pendekatan sosiologi politik menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Dasar sosiologi politik ialah menegakkan ketertiban sosial (Duverger, 1998:18-29).

Pemakaian pendekatan sosiologi politik dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003:20). Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhi, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Ilmu sosiologi politik adalah gabungan antara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga pemerintahannya.

Pendekatan sosiologi politik dipilih ditujukan kepada pemegang kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk menentukan perkembangan politik dan jalannya politik pemerintahan. Begitu pula dengan pemerintahan Soeharto kala itu yang melegitimasi kekuatan militer untuk menjalankan tugas di luar pertahanan dan keamanan (HanKam). Golongan militer menjadi alat pendukung bagi pemerintahan orde baru dalam mendominasi kekuatan politik. Pendekatan sosiologi politik disini digunakan untuk melihat pengambilan keputusan atau kebijakan Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru yakni dengan menerapkan doktrin Dwifungsi ABRI. Menurut peneliti pendekatan sosiologi politik sangat cocok digunakan sebagai alat untuk menganalisis Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998.

Dalam menganalisa permasalahan di atas penulis memilih menggunakan teori hubungan sipil militer menurut Huntington melihat bahwa ada dua bentuk hubungan sipil militer. *Pertama*, kontrol sipil objektif (*Objective Civilian Control*). Istilah ini mengandung makna profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidangnya, subordinansi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik tersebut atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer, minimalisasi intervensi militer dalam politik dan minimalisasi intervensi politik dalam militer. *Kedua*, kontrol sipil subyektif (*subyektif civilian control*). Bentuk kontrol ini adalah memaksimalkan kekuasaan sipil. Model ini bisa diartikan sebagai upaya meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan kelompok-kelompok sipil (Huntington. 1990: 36).

Hubungan sipil militer dipilih untuk mengamati sejauh mana sipil mampu mengurangi hak istimewa militer dan sejauh mana militer berhasil mempertahankan hak-hak istimewanya. Ia memperkenalkan konsep “hak istimewa”. Oleh karena itu, reposisi militer tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana pihak sipil mampu membatasi dan mengurangi otoritas militer. Dengan merujuk Huntington, penulis disini menganalisis hubungan sipil militer dari munculnya persoalan atau konflik internal yang terjadi didalam tubuh militer itu sendiri. dari konflik tersebut mengakibatkan adanya mosi tidak percaya dan menginginkan reorganisasi dalam militer. hal ini yang kemudian menyebabkan militer merasa sipil terlalu dalam mencampuri urusannya, dan menyulut militer juga ingin mengontrol sipil. Situasi seperti ini yang membuat hubungan sipil militer tidak sehat.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak, 1985:32). Metode sejarah berguna untuk mengubah fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Terdapat empat langkah penelitian, yaitu: (1) *heuristik*, (2) *kritik*, (3) *interpretasi*, dan (4) *historiografi*. Dalam pembahasan lebih lanjut, penyusun menggunakan berbagai macam metode yang dianggap sesuai dengan permasalahannya. Adapun langkah-langkah penyusunan adalah sebagai berikut:

Heuristik

Langkah pertama, yaitu tahap penelitian sejarah *heuristik* atau pengumpulan sumber. Pada tahap ini peneliti mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karya jenderal A.H Nasution (1952) yang berjudul *Politik Militer Indonesia*. Dikatakan sumber primer karena penulis sebagai saksi yang hidup sejaman pada peristiwa tersebut, hadir sebagai pelaku yang menyaksikan secara langsung serta mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan politik pemerintahan di Indonesia (Gottschalk, 1985: 35).

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka berupa buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal nasional maupun internasional dan dokumen lainnya yang relevan seperti buku karya Indria Semego (1998) yang berjudul "*Bila ABRI Menghendaki*", Soebjijono (1992) "*Dwifungsi ABRI*", Rizal (1999) "*Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*", Harold Crouch (1986) "*Militer dan Politik di Indonesia*", Sundhahussen (1986) "*Politik Militer Indonesia 1945-1967*", Nugroho (1985) "*Pejuang dan Prajurit*". Sumber sekunder yang peneliti dapatkan juga berupa Skripsi, Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Sumber sekunder berupa jurnal penelitian antara lain Affairs, P., dan Columbia, B. (2014) berjudul "*Politics Under Military Indonesia*", Bhakti, Yanuarti, dan Nuhasim

(2009) berjudul “*Militer Politik, dan Konflik di Indonesia*”, Efendi, D., dan Alam, M. (2018) berjudul “*Indonesia in the Post-Soeharto: Identifying state Ideological typology*”, Mietzner, M. (2001) berjudul “*The Politics of Military Reform un the Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*”, Sciences, P., West, B., Indonesia, J., dan Sciences, P. (2017) berjudul “*Proffesionalism in the post Soeharto Indonesia Military.*”

Peneliti memperoleh sumber sekunder dari UPT Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca Prodi Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej, Toko buku online, Internet dan koleksi pribadi peneliti. Dari sumber-sumber yang dipaparkan diatas tidak kemungkinan sumber yang akan digunakan peneliti bertambah dengan seiringnya perjalanan melakukan penelitian.

Kritik Sumber

Langkah selanjutnya dalam penelian sejarah ini adalah kritik sumber. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 2007:104). Dalam tahap ini, peneliti melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber dengan melakukan dua tahap kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern (Abdurahman, 2007: 68).

Pada kegiatan kritik ekstern untuk sumber dokumen peneliti melakukan pengujian atas keaslian sumber dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh, menyelidiki jenis kertas, tinta dan gaya tulisan yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menyelidiki tahun pembuatan sehingga sumber tersebut dapat dipastikan autentitasnya. Untuk kritik ekstern penulis menguji buku-buku serta jurnal-jurnal.

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku, Buku karya Indria Samego yang berjudul “*Bila Abri Menghendaki*” Buku karya Indria samego merupakan buku penunjang dari peneliti dikarenakan buku tersebut dikeluarkan pada tahun 1998 yang pada saat itu kekuatan militer mulai melemah dalam politik pemerintahan atau bisa dikatakan akhir dari keikutsertaan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia yang diakibatkan terjadinya krisis ekonomi (moneter) dan banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada era Soeharto. sehingga menimbulkan suatu aksi atau gerakan Reformasi yang nantinya

menandai berakhirnya pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Selanjutnya ada buku karya Rizal yang berjudul *“Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia”*. Buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam Kritik ekstern, buku ini diterbitkan pada tahun 1999. meskipun buku tersebut terbit pada tahun 1999 akan tetapi buku tersebut berisi tulisan-tulisan dari penelitian yang dilakukan saat terjadinya keterlibatan militer dalam politik pemerintahan sampai melemahnya kekuatan militer dalam kancah politik hingga transisi demokrasi di Indonesia. Buku selanjutnya karya Harold Crouch yang berjudul *“Militer dan Politik di Indonesia”*. Walaupun buku karya Harold Crouch diterbitkan pada tahun 1986 yang pada saat itu militer masih memiliki peran yang cukup kuat dalam politik pemerintahan akan tetapi buku ini menjadi buku penunjang (sekunder) dikarenakan Harold Crouch tidak terlibat langsung pada saat itu. Selain buku peneliti juga menggunakan Skripsi, dan jurnal-jurnal internasional maupun nasional dalam penulisan penelitian ini.

Kritik tidak hanya dari buku dan koran akan tetapi peneliti juga mengkritik jurnal-jurnal penelitian yang ditemukan dan bersinggungan dengan Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia tahun 1969-2000. Jurnal penelitian tersebut antara lain jurnal penelitian dari Affairs, P., dan Columbia, B. (2014) berjudul *“Politics Under Military Indonesia”*. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014. Jurnal ini sangat mendukung penulisan penelitian dari penulis yang sama-sama membahas tentang kekuatan militer dalam perpolitikan di Indonesia. Jurnal internasional dari Mietzner, M. (2001) berjudul *“The Politics of Military Reform un the Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance”*. Jurnal ini sangat membantu karena berisi tentang reformasi angkatan besenjata (militer) yang sebelumnya memiliki kekuatan dan peran yang begitu besar dalam politik pemerintahan di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2001 yakni setelah runtuhnya rezim orde baru yang digantikan oleh Reformasi yang sekaligus mengakhiri peran militer dalam perpolitikan Indonesia.

Selanjutnya yaitu kritik intern, pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap kesahihan sumber yang diperoleh. Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah tidaknya bukti atau fakta sejarah (Abdurahman,

2007: 70). Kritik intern untuk dokumen atau buku dilakukan peneliti dengan cara memahami maksud dari kesaksian penulis dalam dokumen atau buku tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui dan memahami isi sumber dokumen atau buku yang digunakan. Pada tahap ini peneliti melihat substansi dari buku dan sumber yang digunakan dan kemudian membandingkan kesaksian dari berbagai sumber itu untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk kritik intern penulis menguji buku-buku serta jurnal-jurnal nasional maupun internasional

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku, Buku karya Jenderal A.H Nasution yang berjudul "*Politik Militer Indonesia*". Buku karya Jenderal A.H Nasution merupakan sumber primer dari penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penulis dari buku tersebut ada saat terjadinya peristiwa bahkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan perkembangan politik di Indonesia pada saat itu. Selain itu, kesaksian dari A.H. Nasution dapat dipertanggungjawabkan karena A.H. Nasution adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Indonesia sekaligus penggaga konsep "Jalan Tengah" yang merupakan embrio dari doktrin Dwifungsi ABRI yang nantinya diterapkan oleh pemerintahan Soeharto di era orde baru. Selanjutnya ada buku karya Rizal yang berjudul "*Hubungan Sipil Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*". Buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam kritik intern, penulis menggunakan buku ini karena buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan penelitian mengenai pelaku-pelaku politik dalam proses demokrasi dan bagaimana militer menempatkan diri dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan dari tulisan ini adalah hasil dari fakta-fakta yang dipaparkan di buku.

Penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang berkaitan dengan keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia. Untuk kritik yang pertama jurnal penelitian dari Affairs, P., dan Columbia, B. (2014) berjudul "*Politics Under Military Indonesia*". Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014. Fakta yang dipaparkan pada jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan karena jurnal ini ditulis dengan hasil riset yang dilakukan oleh para ahli. Jurnal internasional dari Mietzner, M. (2001) berjudul "*The*

Politics of Military Reform un the Post-Soeharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institusional Resistance”. berisi tentang reformasi angkatan besenjata (militer} yang sebelumnya memiliki kekuatan dan peran yang begitu besar dalam politik pemerintahan di Indonesia. Dalam jurnal tersebut dihasilkan fakta diantaranya, pemisahan polisi dari militer oleh Wiranto serta diterapkannya kebijakan baru pada November 1998 bahwa perwira aktif tidak lagi diperbolehkan untuk memegang jabatan sipil di birokrasi.

Sumber-sumber yang dipaparkan oleh peneliti diatas adalah sumber yang baru ditemukan oleh peneliti. Peneliti akan mencari sumber yang lain dan relevan dengan penelitian untuk memperkuat fakta-fakta dalam penulisan Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia tahun 1969-2000.

Interpretasi

Interpretasi sering disebut juga dengan analisis data, menurut Kuntowijoyo (1995:100) dalam bukunya ada dua metode yang digunakan dalam interpretasi yaitu: analisis yang artinya menguraikan dan sintesis yang artinya menyatuhkan. Dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan kritik sumber, maka sumber tersebut di analisis secara teliti untuk mendapatkan data-data yang lebih spesifik, relevan dan terkait dengan masalah yang diteliti kemudian diklarifikasikan menurut jenisnya dan disintesis agar memperoleh hubungan antara data yang satu dengan yang lain. Kegiatan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta –fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan yang lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan keterlibatan militer dalam politik pemerintah di Indonesia dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa dengan aspek sebagai berikut: (1) Latar belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998; (2) Bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998; (3) Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik pemerintahan dan pertahanan keamanan di Indonesia tahun 1958-1998. Dari sinilah nantinya dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait dengan

Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah.

Historiografi

Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi/penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985:32). Dapat dikatakan bahwa metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan. Historiografi atau penulisan sejarah ialah cara untuk merekonstruksi suatu gambaran masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 1994:89). Pada tahap ini penulis berusaha menyiapkan hasil penelitian sejarah dalam bentuk penulisan yang utuh dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi ini berdasarkan proses serialisasi (kronologi dan kausasi) dan proses koligasi.

Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah tentang intervensi militer dalam politik pemerintahan di Indonesia dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Penyajian dalam karya tulis ini tersusun secara sistematis diantaranya terdiri dari enam bab, yaitu: Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan penelitian ini, yang menjelaskan tentang Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menemukan berbagai permasalahan yang ingin dikaji. Fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan sumber penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Bab 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan merupakan hasil dari review buku,

skripsi, dan jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Berdasarkan pada permasalahan yang akan dibahas penulis menggunakan pendekatan Sosiologi politik serta menggunakan teori hubungan sipil militer menurut Huntington. Pendekatan ini digunakan sebagai alat bantu yang akan mempermudah penafsiran dalam penelitian. Pendekatan sosiologi politik dipilih ditujukan kepada pemegang kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk menentukan perkembangan politik dan jalannya politik pemerintahan. Begitu pula dengan pemerintahan Soeharto kala itu yang melegitimasi kekuatan militer untuk menjalankan tugas di luar pertahanan dan keamanan (HanKam). Golongan militer menjadi alat pendukung bagi pemerintahan orde baru dalam mendominasi kekuatan politik.. Penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik untuk mengkaji keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan mengenai langkah militer dalam panggung politik di Indonesia. Sedangkan teori Hubungan Sipil Militer dari Huntington. Hubungan sipil militer untuk mengamati sejauh mana sipil mampu mengurangi hak istimewa militer dan sejauh mana militer berhasil mempertahankan hak-hak istimewanya. Ia memperkenalkan konsep “hak istimewa”. Oleh karena itu, reposisi militer tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana pihak sipil mampu membatasi dan mengurangi otoritas militer . Pada bab 3 ini dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ini meliputi: Heuristik, Kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bab pembahasan terdiri dari 4 bab, Bab (4) empat, (5) lima, (6) enam, dan (7) tujuh. Pada bab 4 peneliti menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998. Di dalam bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana awal militer terdorong untuk ikut serta dalam politik pemerintahan. Ada hal-hal pokok yang menyebabkan militer ikut terlibat dalam perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan latar belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia sekaligus menjadi pengantar untuk bab selanjutnya yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab 5 peneliti akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam politik pemerintahan Indonesia tahun 1958-1998. Pada bab ini

peneliti menjelaskan bagaimana dominasi militer dalam bidang politik dengan dibuktikannya menduduki jabatan yang strategis dalam pemerintahan seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan lain sebagainya. Inti dari bab ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kekuatan militer yang begitu besar sehingga dapat menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam pemerintahan.

Bab 6 penulis mengkaji dampak keterlibatan militer terhadap politik pemerintahan di Indonesia tahun 1958-1998. Penulisan pada bab ini menjelaskan dampak dari keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia yang nantinya akan berdampak besar bagi stabilitas politik pemerintahan serta pertahanan dan keamanan negara. Terakhir, pada bab 7 Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian penulis mengenai penelitiannya dan saran yang berisi rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitiannya untuk penelitian selanjutnya, serta sumber-sumber atau pustaka yang digunakan penulis untuk menunjang penelitiannya.



BAB 5. BENTUK KETERLIBATAN MILITER DALAM POLITIK PEMERINTAHAN DI INDONESIA 1958-1998

Militer di Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara sekaligus kekuatan politik. Penggalan sejarah telah membuktikan bahwa sebagian besar militer telah memainkan peran politik yang penting. Militer berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Keterlibatan militer dalam pemerintahan tidak terlepas dengan konsep “Jalan Tengah” yang digagas oleh Jenderal Nasution.

Konsep jalan tengah kemudian dikemas menjadi doktrin “Dwifungsi ABRI” oleh Presiden Soeharto. Dwifungsi ABRI membuat militer semakin kuat posisinya dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Wujud keterlibatan militer dibagi menjadi dua periode yaitu pada masa pemerintahan Soekarno dan pada masa pemerintahan Soeharto. Militer berhasil menduduki kabinet, badan legislatif dan jabatan-jabatan yang strategis. Militer ikut mengawasi setiap kegiatan pemilu serta menjadi kontrol atas proses perpolitikan di Indonesia. Konsep jalan tengah Nasution dan wujud keterlibatan militer dalam politik pemerintahan lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

5.1 Konsep Jalan Tengah Nasution sebagai Dasar Pijakan Militer Terjun dalam Dunia Politik.

Konsep jalan tengah merupakan konsep yang merangkum secara kumulatif perkembangan orientasi, nilai dan keterlibatan militer dibidang pertahanan dan keamanan serta sosial politik. Konsep ini diambil oleh Nasution karena tidak menginginkan tentara Indonesia seperti prajurit Amerika Latin yang menjadi kekuatan politik serta tidak mau meniru model prajurit Eropa yang hanya menjadi alat mati pemerintah (Nasution: 1983: 23). Nasution menggagas konsep jalan tengah karena merasa militer telah berjasa dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Militer juga berhasil meredamkan pergolakan yang bersifat kedaerahan pada masa diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Oleh karena itu Nasution beranggapan bahwa militer berhak untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan.

Jalan tengah dipilih oleh Nasution karena dianggap tepat untuk diterapkan di Pemerintahan Indonesia. Hal ini untuk menghindari kekuasaan politik pemerintahan dipegang penuh oleh militer yang dapat menyebabkan Indonesia menjadi negara otoriter sekaligus tidak menginginkan militer Indonesia hanya menjadi alat mati elite politik saja.

Konsep atau gagasan Nasution kemudian diusulkan kepada Presiden Soekarno untuk diterapkan di Indonesia. Disisi lain Presiden Soekarno membutuhkan kekuatan militer untuk mencapai keinginannya menerapkan demokrasi terpimpin. Soekarno beranggapan bahwa jika menggandeng militer maka keinginannya untuk menerapkan demokrasi terpimpin bisa tercapai dengan mudah (Feith. 1995: 54). Oleh karena itu Soekarno menerima konsepsi Nasution mengenai jalan tengah. Hal ini nantinya menjadi dasar pijakan bagi militer untuk ikut serta dalam politik pemerintahan di Indonesia

Konsepsi Nasution memberikan kesempatan bagi militer sebagai salah satu kekuatan politik bangsa untuk berperan dalam politik pemerintahan. Konsep ini kemudian berkembang dan dilegal formalkan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dengan sebutan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dwifungsi ABRI memberikan pembenaran bagi peran kedua militer yakni peran pertama dalam bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), dan peran kedua dalam bidang sosial politik. Presiden Soeharto menerjemahkan Dwi Fungsi ABRI sebagai campur tangan militer disegala bidang kehidupan. Presiden Soeharto menjelaskan keamanan bukan sekedar gangguan bersenjata melainkan sebagai penolak bahaya gangguan serangan ideologi (Samego, 1998:59).

Peran militer dalam politik merupakan peran kedua yang harus diemban oleh para anggota militer. Peran pertama adalah peran pertahanan keamanan (HanKam) yakni peran yang dilaksanakan oleh setiap kekuatan militer dimana saja di dunia ini. Militer menggunakan keterampilannya dan perlengkapan senjata yang dimilikinya untuk membela negara dan bangsanya dari ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Kedua peran militer ini (HanKam dan Sospol) juga disebut sebagai fungsi-fungsi ABRI. Oleh karena itu militer menjalankan kedua fungsinya secara bersamaan sehingga militer tidak

hanya merupakan kekuatan hankam tetapi juga kekuatan politik. Dengan kata lain, militer bukan hanya menjalankan fungsi hankam (yang lebih menitikberatkan pada tindakan koersif dan represif) melainkan juga fungsi sospol yang memberikan peluang bagi para anggota militer untuk memangku jabatan sipil tanpa meninggalkan statusnya sebagai anggota militer (Samego, 1998:61).

Keterlibatan militer secara langsung dalam politik dalam pandangan pemerintah orde baru bertujuan untuk mencegah diambilnya keputusan-keputusan politik yang bertentangan dengan Pancasila, Proklamasi, dan UUD 1945. Keterlibatan militer secara langsung dalam bidang politik juga memberikan kesempatan kepada para anggota militer untuk berperan lebih besar dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kedua tujuan ini menjadikan militer sebagai stabilisator dan dinamisator kehidupan politik Indonesia. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia merupakan gejala politik yang selalu dicurigai oleh negara-negara yang menganut paham liberal.

Peran sosial politik yang dimainkan oleh militer dianggap mengganggu kehidupan politik karena terlibatnya orang-orang bersenjata dalam politik sehingga kompetisi politik tidak dapat lagi berjalan dengan wajar. Keikutsertaan militer dalam politik tanpa meninggalkan status kemiliteran mereka dikhawatirkan akan mengganggu kompetisi politik yang sehat di antara para politisi sipil, karena kecenderungan militer untuk menggunakan senjata untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini juga disinggung oleh sementara kalangan yang menginginkan pengurangan peran sosial politik di kalangan militer secara bertahap atau bahkan penghapusan peran sosial politik di kalangan militer tersebut dimasa yang akan datang (Samego, 1998:62).

5.2 Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1959-1965

Pada masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia. Jenderal A.H. Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimasi atau “dasar hukum” bagi militer untuk melakukan peranan-peranan politik yang selama ini belum dimiliki. Usaha yang dilakukan ialah dengan mengusulkan gagasannya kepada Presiden Soekarno mengenai Konsep “Jalan Tengah”. Dalam konsep jalan tengah dijelaskan perlunya keterlibatan militer untuk turut secara aktif

melaksanakan peranannya diluar bidang militer (Non-milter). Dengan kata lain militer dapat melakukan peranannya dalam bidang politik pemerintahan. Diantaranya didalam kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah maupun badan-badan usaha yang dikelola oleh negara.

5.2.1 Kabinet

Awal keterlibatan militer pada politik pemerintahan di Indonesia merupakan hasil usulan konsep Nasution kepada Presiden Soekarno. Militer tidak akan mengambilalih kekuasaan akan tetapi akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan nasib bangsa Soekarno menerima gagasan Nasution karena Soekarno membutuhkan kekuatan militer untuk mencapai keinginannya menerapkan demokrasi terpimpin tanpa adanya protes keras diberbagai daerah yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas negara. Soekarno beranggapan jika menggandeng militer dalam pemerintahannya dapat menertibkan gejolak politik yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, sehingga keadaan stabilitas negara dapat terjaga (Sundhaussen, 1986: 220). Salah satu disintegrasi bangsa yang terjadi akibat gejolak politik diantaranya ialah pemberontakan Permesta yang terjadi pada tahun 1957 yang dipimpin Letkol Ventje Sumual. Akibat terjadinya pemberontakan ini Nasution menyarankan Presiden Soekarno untuk menetapkan status negara dalam bahaya dan memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang.

Meluasnya peranan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari peran Nasution. Selain sebagai KSAD, Soekarno mengangkat Nasution menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Alasan Soekarno mengangkat Nasution sebagai Menteri Pertahanan karena Nasution memiliki kedekatan dengan Soekarno (Kasenda. 2014: 63). Nasution selalu mendukung ketika Soekarno membuat keputusan. Salah satu wujud kongkritnya yaitu dekrit presiden. Dekrit presiden jaman Soekarno sukses karena mendapat dukungan oleh militer. Kedudukan ini memberi Nasution wewenang melakukan koordinasi dengan Departemen Pertahanan. Sehingga mengenai pertahanan dan keamanan sepenuhnya diambil alih oleh Nasution.

Keterlibatan militer pada era Demokrasi Terpimpin membuat militer semakin luas peranannya dalam bidang politik di Indonesia. Meluasnya peran

militer tidak terlepas dari setelah diterapkannya konsep Nasution. Hal ini menjadikan militer mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Soekarno membentuk kabinet kerja pada 10 Juli 1959 akan tetapi pada awal dibentuknya kabinet kerja ini militer yang merangkap jabatan dan duduk dalam kabinet hanyalah Jenderal A.H. Nasution yakni sebagai Menteri Pertahanan sekaligus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada tahun 1959 (Wardaya, 1984: 34). Militer baru banyak menduduki kursi dalam kabinet pada saat dibentuknya kabinet Dwikora I dengan masa kerja 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Dari seluruh jumlah anggota kabinet Dwikora I dapat dijumlahkan bahwa 30% anggota kabinet berasal dari golongan militer. Susunan kabinet Dwikora I dapat dilihat di *Lampiran 2*.

Alasan presiden Soekarno banyak melibatkan militer untuk menduduki kursi dalam kabinetnya ialah untuk menghindari terjadinya gejolak politik yang dapat mengakibatkan disintegrasi (pemisahan NKRI). Presiden Soekarno mempertimbangkan keputusannya untuk melibatkan militer dengan melihat kondisi negara sebelumnya yang sempat terjadi gerakan separatisme yang diakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dinilai terlalu mengistimewakan pulau Jawa. Hal ini menyebabkan terjadinya pergolakan diberbagai daerah. Oleh karena itu Presiden Soekarno sangat membutuhkan kekuatan militer untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Peranan Menteri dalam kabinet sudah mulai diduduki oleh golongan militer. Hal itu didasari dari beberapa alasan, diantaranya adalah pengalaman dari golongan militer yang ditunjuk mempunyai pengalaman yang menurut Presiden Soekarno dapat membantu dalam kabinet Dwikora. Golongan militer tersebut salah satunya adalah Letnan Jenderal TNI Prof. dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc. yang merupakan tokoh militer yang mengembangkan perusahaan minyak negara (Permina) yang kemudian berubah menjadi Pertamina. Karena pengalamannya mengembangkan perusahaan minyak negara. Maka Letjen TNI Prof. dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc. diangkat menjadi Menteri Negara dalam kabinet Dwikora I dan sebagai Menteri Urusan Minyak Gas dan Bumi pada kabinet Dwikora II. Karena pengalaman itu Letjen TNI Ibnu Sutowo mendapat kepercayaan dari presiden untuk menjadi Menteri dalam kabinetnya (Karma. 2001: 36).

Susunan menteri yang mempunyai latar belakang militer juga diduduki oleh Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo. Selain sebagai tentara Dr. Soemarno Sosroatmodjo juga merupakan dokter sekaligus menjabat sebagai menteri dalam negeri Indonesia ke-15 pada masa kabinet Dwikora pemerintahan Soekarno. Terpilihnya Dr. Soemarno Sosroatmodjo sebagai menteri karena karier sebelumnya yang merupakan Gubernur DKI Jakarta. Dr. Soemarno Sosroatmodjo dapat dikatakan sukses dalam memimpin Ibukota, pada masa kepemimpinannya, Dr. Soemarno Sosroatmodjo membangunya Monumen Nasional (Monas), Patung Selamat Datang, dan Patung Pahlawan di Menteng. Setelah masa baktinya berakhir, Dr. Soemarno Sosroatmodjo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Karena karier sebelumnya lah membuat Soekarno mempercayakan Dr. Soemarno Sosroatmodjo untuk berada dalam kabinetnya menjadi Menteri Dalam Negeri.

Dari semua susunan Kabinet Dwikora masa Pemerintahan Soekarno alasan adanya Menteri-Menteri yang mempunyai latar belakang militer selain karena adanya konsep Nasution yang memberi kesempatan bagi militer untuk menentukan jalannya pemerintahan, juga didasari karena memang beberapa prestasi yang dicapai sebelumnya. Sehingga membuat Presiden Soekarno mempercayakan kedudukan mereka dalam cabinet Dwikora masa Pemerintaha Soekarno. Selain itu karena memang kekuatan politik pada pemerintahan Soekarno berbentuk segitiga, yakni Soekarno berada dipuncak sebagai pimpinan Negara, Militer berada dibawah kanan, dan partai elite sipil berada dalam kiri bawah, akan tetapi partai elite sipil ini lebih cenderung ke PKI, alasan Soekarno memilih PKI sebagai penyeimbang kedudukan militer dalam pemerintahan karena slogannya yang gotong royong. Maka tidak heran dalam susunan kabinet masa Pemerintahan Soekarno didominasi oleh golongan militer dan PKI.

5.1.2 Badan Legislatif

Badan legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang dalam merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD). Badan legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Di era Soekarno masa dekrit Presiden 1959 DPR sempat dibubarkan melalui Penpres No. 3 tahun 1960 dan digantikan dengan DPR-GR melalui Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR-GR. Alasan dibubarkannya DPR karena DPR hanya menyetujui Rp. 36 miliar

APBN dari Rp. 44 miliar yang diajukan. Alasan fraksi-fraksi di DPR menolak APBN sebanyak Rp. 44 miliar karena pengeluaran negara harus disesuaikan dengan kemampuan sendiri. Sehingga anggaran yang diterima hanya Rp. 36 miliar, dan rakyat tidak dibebani pajak.

Pada masa Soekarno keterlibatan militer tidak hanya terlihat dalam susunan kabinet saja. Akan tetapi juga terlihat dalam badan legislatif yaitu DPR-GR dan MPRS di pemerintahan Soekarno pada tahun 1964. Tujuan Soekarno menempatkan militer dalam jajaran legislatif karena kekuatan militer telah berhasil membantu Soekarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin sekaligus mensukseskan dekrit presiden. Susunan dari badan legislatif dapat dilihat dibawah ini.

NO	Jabatan	Nama
1	Ketua MPRS	Chaerul Saleh
2	Ketua DPR-GR	Arudji Kartawinata
3	Wakil Ketua MPRS	Ali Sastroamidjojo
4	Wakil Ketua MPRS	Dr. K.H. Idham Chalid
5	Wakil Ketua MPRS	D.N. Aidit
6	Wakil Ketua MPRS	Mayjen TNI Wilujo Puspojudo
7	Wakil Ketua II DPA	Prof. Sujono Hadinoto S.H.
8	Wakil Ketua DPR-GR	I.G.G. Subamia
9	Wakil Ketua DPR-GR	M.H. Lukman
10	Wakil Ketua DPR-GR	Laksda (Laut) Mursalin Daeng Mamangung
11	Wakil Ketua DPR-GR	H. Achmad Syaichu

Sumber: tempointeraktif.com

Dari tabel diatas dapat terlihat kedudukan militer dalam badan legislatif yakni pada Wakil Ketua MPRS, dan Wakil Ketua DPR-GR. Dari seluruh jumlah anggota legislatif dapat dijumlahkan bahwa 18% anggota legislatif berasal dari golongan militer.

Kehadiran golongan militer dalam pemerintahan seperti didalam bidang legislatif merupakan hasil dari diusulkanya gagasan atau konsep Nasution pada Presiden Soekarno tahun 1957. Gagasan ini memungkinkan bagi golongan militer

untuk ikut terlibat dalam pemeritahan (Karim. 1989: 39). Selain itu, Presiden Soekarno juga membutuhkan militer didalam pemerintahannya agar stabilitas nasional dapat terjaga. Mengingat banyak terjadinya gerakan separatis yang mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu Presiden Soekarno melibatkan militer dalam politik pemerintahannya. Sehingga dapat terlihat golongan-golongan militer yang menduduki kursi politik dalam pemerintahan.

Seperti halnya dalam badan legislatif yang jumlah golongan militernya pada tahun 1964 masa pemerintahan Soekarno berjumlah 18% (2 orang) yakni Mayjen TNI Wilujo Puspojudo sebagai wakil ketua MPRS, dan Laksda (Laut) Mursalin Daeng sebagai wakil ketua DPR-GR.

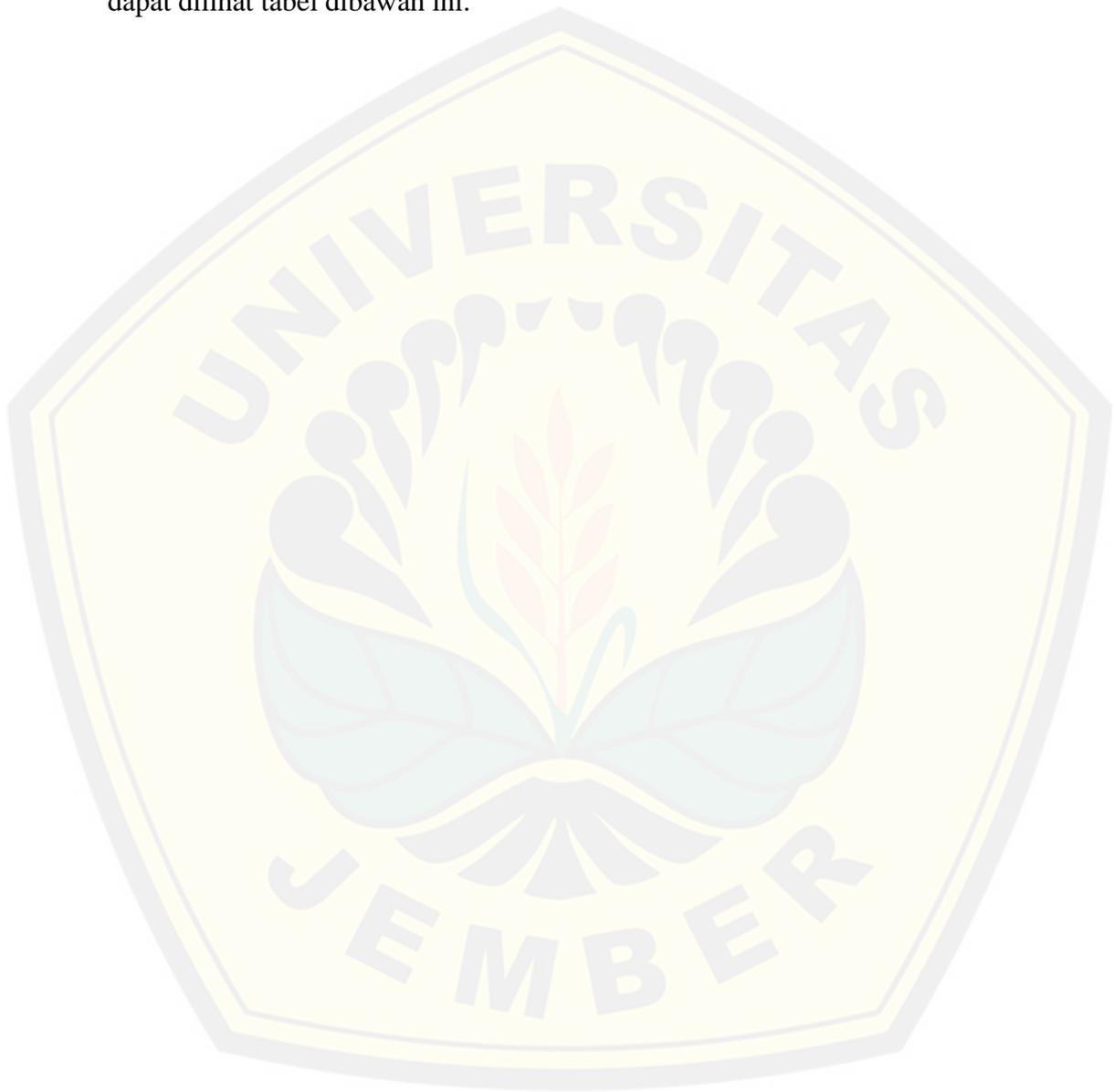
5.1.3 Jabatan Strategis

Keterlibatan militer dalam politik pemerintah tidak hanya terlihat didalam susunan kabinet maupun badan legislatif. Kehadiran militer juga dapat terlihat pada jabatan-jabatan strategis yang diduduki oleh golongan militer pada masa pemerintahan Soekarno tahun 1959-1965. Jabatan strategis memiliki fungsi sebagai pengambil kebijakan. Dampaknya pada perusahaan yang ditentukan oleh pejabat didalamnya. Contohnya dalam Badan usaha yang dikelola oleh negara yang menjabat sebagai pemimpin (Direktur Utama) serta kepala pemerintahan daerah seperti Gubernur (Samego, 1998:59).

Hadirnya militer dalam perusahaan yang dikelola negara tidak terlepas dari perannya yang membantu pemerintah untuk menasionalisasikan aset (perusahaan milik Belanda). Karena pada saat itu kaum serikat buruh melakukan aksi-aksi pengambilan perusahaan milik Belanda. Pemerintah akhirnya menyetujui militer khususnya Angkatan Darat untuk bergerak mengamankan aset milik Belanda. Pada 13 Desember 1957, KSAD Mayor Jenderal Nasution mengumumkan perintah penertiban pengambilalihan. Kini buruh atau kelompok masyarakat secara resmi dilarang melakukan pengambilalihan aset. Maka dari itulah militer banyak melakukan perannya dalam proses nasionalisasi aset. Sehingga militer banyak menempati jabatan-jabatan perusahaan yang dikelola negara.

Badan usaha milik pemerintah yang didalamnya terdapat militer pada masa pemerintahan Soekarno diantaranya Yayasan Badan Pembelian Padi (YBDP) dibentuk didaerah-daerah dan diketuai Gubernur yang sekarang telah

berganti nama menjadi Badan Urusan Logistik (BULOG), Badan Pusat Intelijen (BPI) yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Intelijen Negara (BIN), dan Perusahaan Tambang Minyak Negara (PERMINA) yang sekarang menjadi Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA) yang jabatannya diduduki oleh militer. Berikut daftar gubernur yang diduduki militer dapat dilihat tabel dibawah ini.



NO	NAMA	JABATAN	TAHUN PERIODE
1	Letjen TNI Mashudi	Gubernur Jawa Barat	1960-1965
2	Moch. Wijono	Gubernur Jawa Timur	1963-1967
3	Soemarno Sosromodjo	Gubernur DKI Jakarta	1960-1965
4	Brigjen Mochtar	Gubernur Jawa Tengah	1960-1965
5	Nyak Adam Kamil	Gubernur Aceh	1964-1966

Sumber: wikipedia.org/daftargubernur

Dari tabel diatas dapat terlihat kedudukan militer dalam jabatan kepala pemerintahan daerah (Gubernur) mulai muncul dalam aktivitas perpolitikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengangkatan satu-persatu kolonel dan jenderal dari pihak militer yang diangkat menjadi gubernur. Dari tabel diatas dapat dihitung dari jumlah total Provinsi yang ada di Indonesia yaitu 36 Provinsi, pihak militer sudah menduduki 5 Provinsi besar yang ada di Indonesi (Crouch, 1986: 269).

Selain duduk dalam kabinet dan badan legislatif, eksistensi golongan militer juga terlihat dalam pemerintahan daerah, yakni pada 5 provinsi besar di Indonesia dipimpin oleh gubernu yang berlatar belakang dari golongan militer. Walaupun masih dibawah 50%. Akan tetapi hal ini cukup membuktikan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia cukup mempercayai golongan militer untuk memimpin dan membangun daerahnya. Selain kepala daerah jabatan strategis yang diduduki oleh militer pada masa pemerintahan Soekarno juga terdapat pada badan khusus yang dibentuk oleh negara seperti Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang langsung diketuai oleh kepala daerah (Gubernur), badan rahasia atau badan intelijen, dan Perusahaan Tambang Minyak Negara (Permina).

Alasan Soekarno membentuk Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) adalah karena Soekarno ingin mencanangkan program swamsembada beras bagi Indonesia melalui YBPP yang langsung diketuai oleh kepala daerah masing-masing (Gubernur). Alasan Soekarno memilih kepala daerah disetiap wilayah agar dapat mandiri untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia. Soekarno juga

menolak impor beras untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada negara asing.

Terlibatnya militer dalam lembaga YBPP karena militer telah menempati jajaran kepala daerah (Gubernur). Sehingga secara otomatis militer dapat mengelola lembaga tersebut. Masuknya militer dalam jajaran kepala daerah dikarenakan militer telah mempunyai dasar pijakan untuk berpartisipasi dalam politik pemerintahan di Indonesia. Walaupun jajaran militer dalam kepala daerah (Gubernur) masih dibawah 50% dari seluruh wilayah Indonesia (Pangabean. 1993: 47). Akan tetapi hal ini membuktikan bahwa sebagaimana masyarakat telah mempercayai golongan militer untuk memimpin diwilayahnya.

Selain dalam lembaga YBPP militer juga menduduki jabatan dalam Badan Intelijen Indonesia. Berdirinya badan intelijen ini memang atas dasar perintah Presiden Soekarno untuk membentuk suatu badan rahasia. Soekarno membentuk badan intelijen agar dapat mengontrol atas segala badan dan perorangan pemerintahan. Badan ini juga harus berkoordinasi dengan Markas Besar Umum Tentara yang berada di Yogyakarta.

Badan Intelijen ini berdiri pada tahun 1946 dengan nama Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) yang dikepalai oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Badan ini tidak hanya bertugas mengintai musuh, melainkan juga memberi penerangan akan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada rakyat sipil yang tersebar di seluruh nusantara.

Jabatan strategis seperti Badan Intelijen Indonesia (BIN) dikepalai oleh anggota militer hal ini dikarenakan tugas-tugas didalam badan rahasia ini memang ranah militer. Sehingga tidak mengherankan jika yang mengepalai Badan Intelijen Negara pada masa pemerintahan Soekarno ialah orang dari golongan militer. Susunan dari kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) dapat dilihat dibawah ini:

No.	NAMA	KETERANGAN
1	Kolonel Zulkifli Lubis	Bernama Kepala Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI)
2	Kolonel Laut Pirngadi	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen (BKI)
3	Soebandrio	Bernama Kepala Badan Pusat Intelijen

(BPI)

4 Jenderal TNI Soeharto

Bernama Kepala Badan Pusat Intelijen

(BPI)

Sumber: detikNews.com

Dari tabel diatas dapat dilihat memang kedudukan militer dari jabatan strategis seperti Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Dari seluruhnya dapat dijumlahkan bahwa 75% Kepala Badan Intelijen Negara pada masa Soekarno berasal dari golongan militer. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi badan rahasia ini berada dalam ranah militer.

Kehadiran militer juga dapat dilihat pada Perusahaan Tambang Minyak Negara (PERMINA). Seiring dengan nasionalisasi perusahaan asing, Jenderal Nasution selaku penguasa perang pusat (Pepera) menugaskan Kolonel Ibnu Sutowo membentuklah Perusahaan Tambang Minyak Negara. Pada tanggal 3 April 1958 Ibnu Sutowo ditunjuk menjadi Direktur Utamanya.

Kolonel Ibnu Sutowo merupakan satu-satunya dari golongan militer yang menduduki jabatan Direktur Utama dalam Perusahaan Tambang Minyak Negara. Kedudukan Ibnu Sutowo tidak lepas dari peran Nasution selaku penguasa perang pusat pada saat Indonesia menerapkan S.O.B. Ketika Kolonel Ibnu Sutowo ditunjuk menjadi direktur utama oleh Nasution. Kolonel Ibnu Sutowo mengakui bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang pengelolaan perusahaan tambang minyak (Sutowo. 1979:160). Oleh karena itu Kolonel Ibnu Sutowo merekrut rekannya yang juga dari golongan militer yaitu Mayor Johannes Marcus. Rekannya diminta untuk membantunya dalam mengurus perusahaan tambang minyak negara (PERMINA).

Dibawah kepemimpinan Kolonel Ibnu Sutowo Permina berhasil melakukan kegiatan kerja sama dengan perusahaan minyak Jepang NOSODECO. Permina mendapat pinjaman modal yang dibayarkan dengan minyak mentah. Permina juga mulai membuka kantor perwakilan di Tokyo pada tahun 1960 (Pangabean. 1993: 47). Selain berhasil melakukan kegiatan kerja sama dengan Jepang Permina dibawah pimpinan Kolonel Ibnu Sutowo resmi bergabung dengan OPEC (*Organisation of Petroleum Exporting*) pada tahun 1962. OPEC merupakan suatu organisasi negara-negara pengekspor minyak. Pada tahun 1965

Kolonel Ibnu Sutowo selaku direktur utama Permina berhasil membeli seluruh saham BPM-Shell yang merupakan anak perusahaan minyak milik Belanda. Permina membeli seluruh saham BPM-Shell dengan nilai US\$ 110 juta.

Walaupun Ibnu Sutowo berasal dari golongan militer dan tidak mengetahui bagaimana cara mengelola perusahaan minyak. Namun perkembangan Permina dibawah kepemimpinannya dibidang cukup sukses. Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Soekarno Perusahaan Tambang Minyak Negara dibawah kepemimpinan Kolonel Ibnu Sutowo banyak melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan negara lain serta berhasil membeli seluruh saham anak perusahaan minyak milik Belanda yaitu BPM-Shell.

5.2 Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan tahun 1966-1998

Kedudukan militer dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) semakin kuat setelah dikembangkannya konsep Nasution menjadi doktrin DwiFungsi ABRI. Hal ini dapat dilihat dari peranan militer didalam susunan kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah (Gubernur) serta badan-badan usaha milik negara (BUMN). Wujud keterlibatan militer dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) akan dijelaskan dibawah ini.

5.2.1 Kabinet

Keterlibatan militer dalam pemerintahan Soekarno dianggap berhasil menciptakan stabilitas negara. Keberhasilan tersebut tidak terlepas karena dukungan militer didalamnya. Terlebih lagi pada tahun 1965 Soeharto bersama militer berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi pada peristiwa G30S. Soeharto yang merupakan anggota militer sangat mendominasi peran militer. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Soeharto militer menjadi salah satu komponen penting dalam pemerintahan.

Keterlibatan militer dalam kehidupan politik praktis memuncak pada masa pemerintahan Orde Baru. Militer yang dulu dikenal dengan istilah ABRI masuk hampir di semua ruang-ruang politik diantaranya kedudukan militer berada dalam susunan kabinet (Bilveer. 1995: 19). Hal ini dibuktikan dari semua kabinet yang dibuat pada masa pemerintahan Soeharto terdapat militer didalamnya. Alasan

Soeharto banyak melibatkan militer didalam kabinetnya diluar dari latarbelakang Soeharto sebagai seorang militer, Ia juga berkeinginan melanjutkan konsep Nasution sebagai dasar kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dilakukan Soeharto memberikan peran ganda pada golongan militer. Peran ganda yang dimaksud ialah selain menjaga pertahanan dan keamanan, militer juga ikut berpartisipasi dalam politik pemerintahan. Peran ganda yang dijalankan militer ini diperkuat oleh doktrin Dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan militer baik sebagai kekuatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun sebagai kekuatan sosial politik (Soebijono, 1982:1). Konsep Dwifungsi ini merupakan embrio dari “Jalan Tengah” yang di gagas oleh Nasution. Dengan adanya Dwifungsi ABRI militer mempunyai dasar pijakan untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan di Indonesia.

Dominasi militer di politik pemerintahan khususnya di lembaga eksekutif pada masa Orde Baru terlihat dari banyaknya anggota militer yang menjadi anggota kabinet. Dapat dilihat dari 26 anggota kabinet pembangunan I yang dibentuk Presiden Soeharto delapan orang berasal dari golongan militer. Daftar susunan kabinet pembangunan I yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

Dari data *Lampiran 3* dapat terlihat kedudukan militer dalam kabinet Pembangunan I. Dari seluruh jumlah anggota kabinet dapat dijumlahkan bahwa 29% anggota kabinet berasal dari golongan militer. Hal ini membuktikan bahwa militer tidak hanya menjalankan fungsi utamanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (HanKam) melainkan juga turut berpartisipasi dalam politik pemerintahan. Dalam kabinet yang dibentuk Pemerintahan Orde baru ada sesuatu yang menarik, yaitu dwifungsi yang dilakukan militer. Hal tersebut dapat dilihat didalam kabinet bahwa Kepala Pemerintahan yaitu Soeharto merangkap menjadi menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa dwifungsi yang dilakukan pada masa Orde baru sangat terlihat dalam politik pemerintahan.

Peranan menteri dalam kabinet pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) yakni kabinet Pembangunan tidak jauh beda dengan kabinet Dwikora pada masa pemerintahan Soekarno. Susunan menteri dalam kabinet pembangunan juga

terisi dari golongan-golongan militer. Salah satunya ialah Mayjen TNI Basuki Rahmat yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelum diangkat menjadi menteri oleh Soeharto Mayjen Basuki Rahmat merupakan Jenderal TNI yang menjadi saksi penandatanganan Supersemar. Setelah Soekarno menandatangani Surat perintah tersebut, Basuki dipercaya untuk membawa surat keputusan dan diperintahkan untuk menyampaikannya pada Soeharto. Beberapa hari setelah Supersemar keluar tepatnya pada tanggal 28 maret 1966 Basuki Rahmat diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri oleh Soeharto.

Diangkatnya Mayjen Basuki Rahmat menjadi Menteri Dalam Negeri dikarenakan kedekatannya dengan Soeharto saat peristiwa Supersemar. Selain itu juga alasan Soeharto memilih Mayjen Basuki Rahmat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam susunan kabinetnya karena sama-sama mempunyai latar belakang militer. Soeharto sengaja menggunakan kekuatan militer untuk memperkuat kedudukannya dalam politik pemerintahan di masa orde baru.

Kedudukan militer semakin kuat dalam pemerintahan setelah Soeharto menjadi Presiden. Hal ini karena Presiden Soeharto juga mempunyai latar belakang militer. Terlebih ketika doktrin Dwifungsi ABRI mulai diterapkan yang membuat militer semakin kuat dan mempunyai legalitas dalam politik pemerintahan. Selain itu saingan militer yakni partai PKI menjadi partai yang sangat dilarang di Indonesia setelah terjadinya peristiwa G30S. Akibatnya militer semakin kuat kedudukannya dalam politik pemerintahan pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1973, Jumlah anggota militer yang duduk didalam kabinet bertambah menjadi tiga sehingga menjadi 11 orang. Tiga nama anggota kabinet yang masuk dari golongan militer ialah Mayjen Paraben Pangabean sebagai Menteri Penerangan, Mayjen Subroto sebagai Menteri Tenaga Kerja, dan Mayjen Sudharmono sebagai Menteri Negara. Jumlah anggota militer dalam susunan kabinet pembangunan II menjadi dua puluh orang pada tahun 1981. Susunan kabinet Pembangunan II dapat dilihat di *Lampiran 4*. Sepuluh orang menjabat Menteri Koordinator, dan delapan orang menjabat Menteri yang mengepalai Departemen (Samego,1998: 107). Maka dari itu tidak mengherankan jika pada masa pemerintahan Soeharto semua susunan kabinetnya (Kabinet Pembangunan I

sampai VII) terdapat orang-orang yang memang berlatar belakang militer atau golongan militer. Susunan kabinet Pembangunan I sampai VII dapat dilihat di *Lampiran 3 sampai dengan Lampiran 9*.

5.2.2 Badan Legislatif

Lembaga legislatif mengalami perubahan kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto. Soeharto telah merombak lembaga legislatif yang bersifat sementara tanpa melalui pemilu. Pada masa pemerintahan Soeharto setiap kegiatan yang dilakukan lembaga legislatif sepenuhnya dibawah kontrol eksekutif. Misalnya dalam membuat undang-undang yang merupakan tugas dari lembaga legislatif tidak bisa berjalan melainkan atas perintah dari eksekutif. Sehingga keputusan yang dihasilkan harus melalui ketentuan dan persetujuan dari eksekutif (Budiardjo, 2002:36). Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Soeharto (Orde Baru) ingin mengontrol penuh keputusan yang dibuat badan legislatif.

Peran militer dalam lembaga legislatif dilihat dari terlibatnya golongan militer dalam keanggotaan di lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan di lembaga MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Tugas didalam lembaga ini adalah menyusun dan membuat Undang-Undang bersama pemerintah dan juga mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) merupakan pengganti DPR. Keanggotaan dari lembaga DPRGR diangkat tidak melalui pemilihan umum tetapi diangkat langsung oleh orang-orang yang berkuasa. Keseluruhan anggota DPRGR sejak tanggal 21 Januari 1967 berjumlah 350 orang. Melalui lembaga DPRGR, Presiden Soeharto mengawali penambahan jumlah anggota organisasi secara kuantitatif yang didalamnya terdapat militer sebagai anggota yakni melalui fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan. Penambahan anggota DPRG ini sebanyak 64 orang. Dari penambahan jumlah anggota tersebut maka jumlah seluruh anggota DPRG menjadi 414 orang. Anggota tersebut terdiri dari:

NAMA PARTAI	JUMLAH
PNI	78 orang
NU	75 orang

Parkindo	17 orang
Partai Khatolik	15 orang
PSII	20 orang
IPKI	11 orang
Perti	9 orang
Murba	4 orang
Partai Muslimin	18 orang
Fraksi ABRI	75 orang
Fraksi Karya	92 orang
Jumlah Anggota DPRGR	414 orang

Sumber: Marbun, 1992.

Susunan keanggotaan DPRGR diatas menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah anggota militer yang tidak sedikit dan didalamnya juga dilibatkan militer di dalam keanggotaan DPRGR. Masuknya militer dalam lembaga ini juga memungkinkan kekuasaan berada penuh ditangan Soeharto sebab mereka yang diangkat (Militer) tidak akan menentang Soeharto. Hasil keputusan-keputusan tidak dapat diganggu gugat dan mutlak sepenuhnya berada ditangan militer. Sehingga sipil pun harus tunduk pada keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga yang membuat Undang-Undang. Keberadaan militer dalam DPRGR terbukti cukup efektif dalam rangka mengamankan kebijakan Presiden dan dapat meminimalisasikan kekuatan kontrol terhadap eksekutif (Marbun, 1992: 142).

MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) merupakan lembaga yang bersifat sementara. Pada masa ini MPRS mengalami perubahan. Sebelumnya pimpinan MPRS tidak merangkap pimpinan DPRG, tetapi sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1966 tentang keanggotaan DPRGR, kedua lembaga ini berada dalam satu tangan. Mengakibatkan kedudukan dan fungsi MPRS menjadi lebih luas dan memberikan peluang bagi militer untuk mengamankan nilai dan kepentingan penguasa dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan MPRS. Masuknya militer dalam lembaga legislatif, memudahkan Presiden Soeharto untuk mengontrol sipil dan memudahkan gerak bagi militer untuk berkuasa dalam bidang politik yang sesuai dengan “dwifungsinya.” Dengan militer dilembaga

legislatif, sipil harus tunduk sesuai dengan perintah atasannya, dimana militer telah menduduki jabatan strategis dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Militer cenderung bersifat otonom dari segala campur tangan terhadap pemerintahan sipil yang berkuasa dan membuat lembaga legislatif menjadi sangat lemah terhadap pemerintah sebab keanggotaannya selalu didominasi oleh militer. Akibatnya sangat kecil kemungkinan timbulnya oposisi yang kuat dilembaga legislatif yang dapat menjadi pengawas efektif peran eksekutif dalam penyelenggaraan negara (Saifulloh, 1994: 136).

Dominasi militer atas politik pemerintahan di Indonesia memungkinkan militer dapat menentukan arah jalannya roda pemerintahan. Militer mempunyai pengaruh kuat atas kebijakan-kebijakan pemerintah disemua tingkat, karna militer telah berhasil menduduki jabatan-jabatan yang strategis yang dulunya diduduki oleh sipil. Pergeseran jabatan dari sipil pada golongan militer menandai bahwa militer bukan hanya menjadi alat pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga menjadi kekuatan sosial politik bagi pemerintahan Indonesia. Munculnya kekuatan militer dalam politik pemerintahan mengakibatkan partai-partai politik tidak mendapatkan tempat yang penting. Peranan yang dimainkan oleh partai-partai politik pada era Orde Baru semakin pada mulanya tidak jelas hal ini diakibatkan ketidakpercayaan golongan militer pada kaum elite politik, beberapa perwira militer menganggap partai-partai politik yang besar pada era demokrasi terpimpin hanya menjadi mesin pelindung bagi kepentingan sebagian masyarakat. Selain itu juga panglima dan komandan-komandan daerah mengakui bahwa partai-partai politik yang mapan atau besar memungkinkan dapat mengumpulkan atau menghimpun oposisi rakyat untuk melawan pemerintahan. Hal ini menggambarkan militer menjadi kekuatan sosial politik. Sehingga menimbulkan persaingan antara elite politik (sipil) dengan golongan militer yang menginginkan ikut serta dalam politik pemerintahan. (Crouch, 1986: 277).

Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri. Keterlibatan militer di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan militer dan Golkar

disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973). Militer mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat I dan daerah tingkat II jabatan Ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Selain dalam sektor eksekutif, militer dalam bidang politik juga terlibat dalam sektor legislatif. Meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memiliki wakil dalam DPR dan MPR melalui Fraksi Karya ABRI.

Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR; serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, ABRI (wakil militer) mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh militer. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari:

1. Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon, Menteri, bahkan Duta Besar diisi oleh anggota militer yang “dikaryakan.”
2. Selain dilakukannya pembentukan Fraksi ABRI di parlemen, militer bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai “partai politik” yang berkuasa pada waktu itu.
3. militer melalui berbagai yayasan yang dibentuk, diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya.

Keterlibatan militer yang begitu luas pada era pemerintahan Soeharto (Orde Baru) ini tentu didukung oleh sumber daya perwira atau pimpinan militer yang tidak hanya didoktrin dalam peran Dwifungsi ABRI, melainkan juga jumlah rekrutmen yang semakin meningkat. Dilihat dari jumlah rekrutmen militer yang awalnya 59 orang pada tahun 1960 (Orde Lama) menjadi 465 orang di tahun 1969 (Orde Baru). Banyaknya jumlah militer dalam politik pemerintahan pada masa

orde baru tidak terlepas dari pemimpin pada saat itu. Presiden Soeharto yang merupakan orang militer akan banyak memilih orang-orang dari golongan militer untuk membantu menyokong kekuasaannya. Hal ini juga menyokong peran militer diberbagai bidang atau sektor (Suryadina. 1992: 10).

5.2.3 Jabatan Strategis

Kedudukan militer tidak hanya terlihat dalam kabinet maupun badan legislatif. Militer juga menduduki jabatan-jabatan seperti kepala pemerintahan daerah Gubernur dan kepala Badan-badan yang dibentuk negara seperti Badan Intelijen Negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini membuktikan bahwa militer pada masa pemerintahan Soeharto telah menjadi kekuatan politik di Indonesia. Daftar nama Gubernur di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawa.

NO.	NAMA	JABATAN	TAHUN PERIODE
1	Letjen Solihin G.P.	Gubernur Jawa Barat	1970-1975
2	Ali Sakidin	Gubernur DKI Jakarta	1966-1977
3	Mayjen H. Moenadi	Gubernur Jawa Tengah	1966-1974
4	Brigjen Soekarman	Gubernur Bali	1967-1978
5	Soemadi	Gubernur Kalimantan Barat	1966-1972
6	Soenandar Prijosoedarmo	Gubernur Jawa Timur	1978-1983
7	Mayjen Aang Kunaefi	Gubernur Jawa Barat	1975-1983
8	Tjokro Pranoto	Gubernur DKI Jakarta	1977-1982
9	Letjen Soepardo Rustam	Gubernur Jawa Tengah	1974-1982
10	Kolonel Kadarusno	Gubernur Kalimantan Barat	1972-1977
11	Brigjen Acub Zaenal	Gubernur Papua	1973-1975

12	Letjen Wahono	Gubernur Jawa Timur	1983-1988
13	Letjen Yogie Suardi memet	Gubernur Jawa Barat	1985-1993
14	Soeprato	Gubernur DKI Jakarta	1982-1992
15	Mayjen Muhammad Ismail	Gubernur Jawa Tengah	1982-1988
16	Mayjen Soedjiman	Gubernur Kalimantan Barat	1977-1998
17	Mayjen Soetran	Gubernur Papua	1975-1981
18	Mayjen Soelarso	Gubernur Jawa Timur	1988-1983
19	Mayjen Raden Nana Nuriana	Gubernur Jawa Barat	1993-1998
20	Wiyoso Atmodaminto	Gubernur DKI Jakarta	1987-1992
21	Mayjen Moch. Basofi Soedirman	Gubernur Jawa Timur	1983-1998
22	Soeradji	Gubernur DKI Jakarta	1992-1997
23	Sutiyoso	Gubernur DKI Jakarta	1998

Sumber: wikipedia.org/daftargubernur

Dilihat dari data diatas dapat dilihat bahwa militer sangat mendominasi dalam kancah pepolitikan. Hal tersebut dibuktikan bahwa nama-nama pejabat tinggi militer diangkat menjadi pemimpin kepala daerah atau Gubernur di wilayah pulau Jawa ataupun diluar pulau Jawa. Hal ini mengartikan bahwa peran mliter dalam kancah perpolitikan di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto begitu kuat.

Militer yang dulu dikenal dengan istilah ABRI masuk hampir di semua ruang-ruang politik. Tidak hanya itu militer juga menduduki jabatan-jabatan yang strategis, seperti kepala daerah (gubernur) serta berada di dalam perusahaan-

perusahaan yang dikelola oleh negara. Salah satu bukti militer menduduki jabatan strategis yakni Letjen Marinir Ali Sakidin yang menjadi gubernur Jakarta sampai tahun 1977 pun digantikan oleh orang-orang militer dari Angkatan Darat. Sedangkan di Jawa Timur hanya memiliki satu gubernur kalangan sipil yang memimpin dari tahun 1967-1976. Untuk di Jawa Tengah sejak 1966 sampai 1974 gubernur dipegang oleh kalangan militer, yakni Mayjen Moenandi. Jabatan strategis yang diduduki oleh militer tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Ibukota ataupun Jawa saja yang merupakan pusat pemerintahan, akan tetapi juga terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan juga di Sulawesi.

Turunnya pejabat sipil atau pergeseran sipil yang kemudian diduduki oleh golongan militer dari jabatannya juga terjadi pada awal tahun 1965 dan 1968 jumlah bupati dan walikota sipil turun dari 15 menjadi 3 di wilayah Jawa Barat, untuk wilayah Jawa Tengah dari yang semula 38 menjadi 19, di wilayah Yogyakarta yang awalnya sebanyak 33 menjadi 20, dan di Jawa Timur dari 40 menjadi 37. Pada tahun 1969 jumlah bupati dan walikota militer berjumlah 147 orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 271. Hal ini menandakan begitu kuatnya kedudukan militer dalam politik pemerintahan. Militer juga melakukan kontrol dan pengawasan ketat kepada komunitas politik, seperti partai politik dan masyarakat sipil (Crouch, 1986: 272).

Militer juga mengintervensi internal parpol dan bisa menjatuhkan ketua umum parpol dengan berbagai macam cara jika dianggap melawan kekuasaan. Militer juga melakukan kontrol terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilu. Dalam setiap proses pemilu, militer terjun langsung mengawasi dan mengintervensi proses pemilu. Tidak heran jika hasil pemilu pada masa Orde Baru selalu memenangkan parpol yang akan mendukung kelanggengan kekuasaan Soeharto.

Keterlibatan militer dalam politik di masa Orde Baru ditopang doktrin Dwifungsi ABRI dan struktur komando teritorial (koter). Pada masa Orde Baru, keberadaan koter memang sangat terkait dengan Dwifungsi ABRI. Meski cikal bakal koter ada pada masa Orde Lama, fungsi koter sebagai struktur yang menunjang peran politik militer baru dipermanenkan dan diperkuat pada masa Orde Baru. Dalam diskursus kajian militer dan keamanan, persoalan tentang peran

internal militer di dalam sebuah negara melalui kegiatan diluar ke militeran (non-militer) memang menjadi perhatian banyak kalangan. Sebagian pandangan memandang keterlibatan militer dalam kegiatan diluar ke militeran di dalam negeri yang dilakukan secara berlebihan dan tidak kontekstual akan membuka ruang kembalinya militer dalam politik.

Pada zaman Orde Baru bukan hal yang aneh jika ada tokoh militer aktif yang menjabat sebagai kepala daerah seperti gubernur hingga bupati/walikota. Soeharto juga tak jarang menunjuk sosok militer untuk mendampingi sebagai wakil presiden, yakni Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Soedharmono (1988-1993), dan Try Sutrisno (1993-1998). Tak hanya di sektor politik dan pemerintahan. Militer juga berkecimpung di lembaga atau perusahaan milik negara, peradilan, bahkan di ranah bisnis sebagai tentara merangkap pengusaha (Sjamsuddin, 1991:129).

Soeharto yang telah menjabat Presiden menginginkan adanya penggunaan program pemerintah yang efektif untuk diterapkan diseluruh wilayah tanpa diselewengkan oleh organisasinya, maka diperlukanlah suatu organisasi yang efektif dan tanggap terhadap pimpinan pejabat eksekutif. Usaha memasukkan militer ke dalam organisasi dirasa tepat dan paling strategis untuk dilakukan, karena akan menciptakan peluang kelangsungan kekuasaan. Oleh karena itu, maka dimulailah pengorganisasian dengan melakukan pergeseran dan pergantian kekuasaan dari tangan sipil ke tangan militer. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan militer melakukan kontrol atas sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepiawaian Soeharto dalam bidang politik dengan memakai konsep Dwifungsi ABRI. Konsep ini dijadikan sebagai dasar pijakan militer untuk terlibat langsung dalam bidang politik serta untuk memulai melegitimasi peran militer agar dapat menguasai politik pemerintahan. Dengan kata lain doktrin Dwifungsi yang digunakan Soeharto merupakan sebuah proses pemindahan kekuasaan bagi militer untuk dapat menduduki jabatan sipil dan mendapatkan peranan politik dalam pemerintahan.

Selain kepala daerah jabatan strategis yang diduduki oleh militer pada masa pemerintahan Soeharto juga menduduki badan khusus yang dibentuk oleh negara seperti badan rahasia atau badan intelijen dan Badan Usaha Milik Negara

seperti Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), dan Badan Usaha Logistik (Bulog).

Badan Intelijen pada era orde baru atau masa pemerintahan Soeharto tidak jauh berbeda dengan masa Soekarno. Militer masih sangat mendominasi dalam jabatan ini. Bahkan dapat dikatakan dari semua yang mengepalai Badan Intelijen Negara masa pemerintahan Soeharto berasal dari golongan militer. Susunan dari kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) dapat dilihat dibawah ini:

No.	NAMA	KETERANGAN
1	Brigjen TNI Yoga Soegomo	Bernama Kepala Komando Intelijen Negara (KIN)
2	Mayjen TNI Soedirgo	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
3	Mayjen TNI Sutopo Juwono	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
4	Jenderal TNI Yoga Soegomo	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
5	Letjen TNI Sudibyso	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
6	Letjen TNI Moetojib	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)
7	Letjen TNI Zaini Azhar	Bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)

Sumber: detikNews.com

Dari tabel diatas dapat dilihat memang kedudukan militer dari jabatan strategis seperti Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Dari seluruhnya dapat dijumlahkan bahwa 100% Kepala Badan Intelijen Negara pada masa Soekarno berasal dari golongan militer. Selain tugas dan fungsi pokok Badan Intelijen Negara memang berada dalam ranah militer, hal ini juga tidak terlepas dari kepala negara atau presiden yang pada saat itu berasal dari golongan militer yaitu Presiden Soeharto. Sehingga dalam masa pemerintahannya kedudukan militer sangat mendominasi.

Jabatan Strategis yang diduduki oleh militer selain pada Badan Inteligen Negara juga dapat dilihat dalam susunan kepala BUMN. Orang militer yang menduduki jabatan strategis itu diantaranya ialah Letjen TNI Ibnu Sutowo yang dipercayai untuk mengelola PT Tambang Minyak Milik Negara (Pertamina).

Pertamina dibawah pimpinan Letjen Ibnu Sutopo mengakibatkan negara mengalami kerugian akibat kongkalikong Ibnu Sutowo dengan pihak Jepang. Kerugian ini mencapai US\$ 1.554.590,28 (Karma. 2001: 41). Maka dari itu pemerintah Indonesia dibawah Presiden Soeharto membentuk tim yang bernama *Komisi Empat* untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina. Pada tahun 1975, Pertamina jatuh krisis. Kemudian pada tahun 1976, Ibnu Sutowo mengundurkan diri sebagai Dirut Pertamina, dan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang sebesar US\$ 10,5 miliar.

Jabatan Dirut Pertamina kemudian diganti oleh Piet Haryono pada 15 April 1976 yang juga berlatar belakang militer. Presiden Soeharto mempercayakan Pertamina pada Piet Haryono agar dapat bangkit dari pintu kebangkrutan. Beberapa cara dilakukan oleh Piet Haryono untuk menyelamatkan Pertamina seperti membatalkan berbagai kontrak yang telah disepakati untuk mengurangi beban keuangan Pertamina.

Walaupun Letjen Ibnu Sutowo sebagai Dirut Pertamina pertama yang merupakan golongan militer melakukan kesalahan yang merugikan negara. Akan tetapi Presiden Soeharto tetap memilih orang yang berlatar belakang militer sebagai penggantinya yaitu Piet Haryono untuk membenahi Pertamina. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan militer pada masa pemerintahan Soeharto sangatlah mendominasi. Berikut susunan Direktur utama Pertamina pada masa pemerintahan Presiden Soeharto:

No.	NAMA	MASA JABATAN
1	Ibnu Sutowo	1968-1976
2	Piet Haryono	1976-1981
3	Joedo Soembono	1981-1984
4	A.R. Ramli	1984-1988
5	Faisal Abda'oe	1988-1996
6	Soegijanto	1996-1998

Sumber: Kompas.com.

Keberadaan militer dalam Badan Usaha Milik Negara juga dapat dilihat dalam Badan Urusan Logistik (BULOG). Direktur utama BULOG yang berlatar belakang militer ialah Letjen Bustanil Arifin. Letjen Bustanil Arifin menduduki jabatan sebagai direktur utama BULOG semenjak 29 Maret 1978 hingga 17 Maret 1993 sekaligus merangkap menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam susunan kabinet pembangunan IV dan V. Susunan kabinet Pembangunan IV dan V dapat dilihat di *Lampiran 6 dan Lampiran 7*.

Terpilihnya Letjen Bustanil Arifin sebagai direktur utama BULOG sekaligus salah satu menteri dalam kabinet tidak terlepas dari sosok Soeharto. Letjen Bustanil Arifin adalah suami dari Raden Ayu Soehardini, yang masih kerabat dengan Raden Ayu Siti Hartinah Soeharto (Pangabean, 1993: 52). Alasan kedekatan itulah Letjen Bustanil Arifin diberi kepercayaan untuk menjadi direktur utama BULOG sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri Koperasi dalam susunan kabinet pemerintahan Soeharto. Berikut susunan Direktur utama Pertamina pada masa pemerintahan Presiden Soeharto:

No.	NAMA	MASA JABATAN
1	Letjen TNI Bustanil Arifin	1978-1993
2	Prof. Dr. Ibrahim Hassan MBA	1993-1995
3	Dr. Beddu Amang M. Sc	1995-1998

Sumber: Kompas.com.

Bulog merupakan salah satu elemen utama penunjang dalam pemerintahan Orde Baru. Dibawah kepemimpinan Soeharto urusan pangan sebagai salah satu unsur dalam ketahanan negara. Letjen Bustanil Arifin selaku direktur utama BULOG berhasil membawa Indonesia meraih Swasembada beras pada tahun 1984. Hal ini membuktikan walaupun Letjen Bustanil Arifin berlatar belakang militer namun ia mampu menjalankan perannya dalam salah satu perusahaan negara yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG).

BAB 6. DAMPAK KETERLIBATAN MILITER TERHADAP STABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN KEAMANAN DI INDONESIA 1958-1998

Masuknya golongan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia membawa dampak terutama dalam bidang politik dan bidang pertahanan serta keamanan negara. Hadirnya militer sebagai kekuatan politik dalam pemerintahan tidak dapat terhindarkan lagi setelah dilegitimasinya gagasan atau konsep Jenderal Nasution oleh Presiden Soekarno yang kemudian dikembangkan menjadi Dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Kehadiran golongan militer pada politik pemerintahan di Indonesia berdampak pada dua hal yaitu stabilitas politik pemerintahan Indonesia dan stabilitas pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dampak keterlibatan militer terhadap stabilitas politik dan pertahanan keamanan Indonesia lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

6.1 Stabilitas Politik Pemerintahan

Stabilitas politik adalah gagasan bahwa lembaga pemeritah memiliki kontrol dan bahwa hal-hal tampaknya menjadi stabil dan lancar. Untuk mencapai stabilitas politik maka militer diberi peran ganda oleh pemerintah yaitu sebagai pertahanan dan keamanan negara serta juga terlibat dalam pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya Fraksi ABRI di MPR, DPR, dan DPRD serta diberbagai jabatan strategis seperti kepala daerah yang berfungsi sebagai stabilisator pada situasi politik negara. Keadaan stabilitas politik pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

6.1.1 Politik Dalam Negeri

Dominasi militer dalam politik pemerintahan menyebabkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat. Militer yang hierarkis dan disiplin akan mempersulit partisipasi masa yang menuntut adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Organisasi massa dan partai yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah akan mengalami kesulitan karna adanya kontrol yang ketat oleh pemerintah.

Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan menjadikan aspirasi rakyat semakin tertekan. Akibatnya masyarakat tidak bisa menyampaikan partisipasi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan (Fattah. 2005: 165).

Upaya militer dalam menyaingi partai yang sangat berperan dominan dalam politik pemerintahan pada masa Pemerintahan Soekarno yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan membentuk suatu organisasi yang bernama Golongan Karya. Pada 20 Oktober 1964 organisasi ini bergabung dalam sekretariat bersama golongan karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar merupakan organisasi dalam Front Nasional yang tidak berafiliasi dengan partai-partai politik dan menentang dominasi PKI. Dalam kepemimpinan Sekber Golkar peranan militer semakin menonjol. Terlebih ketika memasuki masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru).

Kedudukan militer dalam organisasi Sekber Golkar diperbolehkan mengikuti pemilu 1971 berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemilu 1969. Seperti halnya dengan partai-partai politik lainnya yang telah mempunyai wakilnya dalam Badan Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak awal pemerintahan Soeharto, Sekber Golkar telah membuktikan sebagai partner terpercaya bagi militer. Menjelang pemilu 1971, Sekber Golkar ikut maju dalam pemilu dibawah satu tanda gambar “Beringin” dengan nama Golongan Karya (Golkar). Pada saat pemilu 1971 militer memberikan dukungan pada Golkar di pusat maupun didaerah yang pada waktu itu pimpinan banyak yang dijabat oleh perwira-perwira militer. Hasilnya Golkar keluar sebagai pemenang dalam pemilu 1971 dengan memperoleh suara sebesar 63% dari jumlah suara pemilu (Fattah. 2005: 157).

Pemilu 1971 menghasilkan kemenangan mutlak bagi “koalisi” militer-Golkar sebagai fraksi-fraksi yang mendukung kebijakan pemerintah mulai dari MPR, DPR, DPRD I, sampai DPRD II. Hal ini memudahkan diterimanya konsep dalam pemerintahan orde baru dalam badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat. Konsep itu berupa gagasan fusi atau penyederhanaan partai politik yang dianggap sejenis. Gagasan fusi tertuang dalam pidato Presiden Soeharto dalam Kongres XII PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Sebelum itu, wacana

penyederhanaan partai politik juga sudah tertuang dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966.

Setelah teraksananya pemilu 1971, tepatnya pada tahun 1973 MPR mengeluarkan ketetapan GHBN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi atau partai peserta pemilu. Pada waktu itu terdapat 9 parpol ditambah 1 organisasi masyarakat yakni Golkar. Partai-partai pertama yang melakukan fusi adalah partai politik yang berideologikan Islam, yakni Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI. Keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhitung sejak 5 Januari 1973. Pada tanggal 10 Januari 1973, kelompok nasionalis beserta partai non-Islam yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Khatolik. Hasil fusinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Golkar sebagai pemenang pemilu 1971 tetap menjadi organisasi masyarakat, dan inilah kendaraan politik yang didalamnya banyak diduduki para anggota militer yang dibutuhkan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya.

PPP, PDI, dan Golkar pun bersaing pada pemilu 1977 untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD. Sementara pemilihan Presiden berada dalam ranah MPR. Pada pemilu 1977 pemilihan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Pemilih tidak dapat melihat wajah dan mengetahui nama calon anggota parlemen, dan hanya bisa mencoblos partai politiknya saja. Hasil dari pemilu 1977 Golkar memperoleh kemenangannya lagi dengan perolehan suara 62,1% dan memperoleh 232 kursi di DPR. PPP berada dalam posisi kedua dengan perolehan suara 29,2% dan memperoleh 99 kursi. PDI menempati urutan ketiga dengan perolehan suara 8,6% dan menempati 29 kursi di DPR. Setelah pemilu 1977 terselenggarakan, dikeluarkan kebijakan Menhankam/Pangab, bahwa anggota militer tidak diperbolehkan merangkap jabatan pimpinan Golongan Karya, baik dipusat maupun di daerah, dan ditentukan bahwa anggota militer yang ikut berkampanye atau menjadi calon Golongan Karya harus melepaskan status militernya atau dipensiunkan (Soebijono. 1997: 123).

Pemilu ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Hasil perolehan suara kembali dimenangkan oleh Golkar. Walaupun Golkar tidak memperoleh kemenangan di Aceh. Akan tetapi Golkar berhasil memperoleh kemenangan dari PPP di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi. Sedangkan PPP dan PDI kehilangan 5 kursi di parlemen.

Pemilu keempat dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari pemilu ini terdapat pengurangan kursi terhadap partai PPP yakni dari 66 kursi menjadi 33 kursi. Dikarenakan ada larangan penggunaan asas Islam. Pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila. Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi, dan PDI memperoleh tambahan 40 kursi karena PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Soepardjo Rustam. PDI terus berusaha menyaingi Golkar yang merupakan partner militer.

Pemilu kelima diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992. Hasil dari pemilu ini Golkar memperoleh 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi, dan PDI memperoleh 56 kursi. Walaupun Golkar mengalami penurunan perolehan kursi yakni 299 kursi di pemilu 1987. Akan tetapi pada pemilu ini Golkar masih menjadi pemenang karena perolehan kursi diparlemen lebih banyak dibandingkan PPP dan PDI.

Pemilu keenam dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya Golkar kembali mendapatkan suara mayoritas yakni mencapai 74,51% dengan perolehan 325 kursi. PPP mendapatkan perolehan suara 5,43% dengan 27 kursi. Sedangkan PDI hanya mendapatkan 11 kursi. Hal ini diakibatkan konflik internal yang terjadi dalam PDI sehingga mengalami perpecahan antara PDI Soeardji dan PDI Megawati Soekarno Putri (Soebijono. 1997: 186).

Dari data pemilu diatas, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menjalankan demokrasiya secara tertib dan dijiwai oleh asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Namun, kenyantaanya pemilu didominasi dan dimenangkan oleh partai tertentu yakni partai Golongan Karya (Golkar). Kemenangan Golkar secara berturut-turut dalam pemilu 1971-1997 menguntungkan pemerintahan dengan perimbangan suara di MPR dan DPR. Memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam

periode. Dengan demikian militer berhasil dalam menciptakan stabilitas politik nasional, namun militer gagal dalam mengembangkan demokrasi, dan berujung pada penyimpangan Hak Asasi Manusia (HAM).

6.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional Indonesia. kepentingan nasional ini merupakan landasan dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam mencapai cita-cita nasional. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip bebas aktif yang berarti Indonesia tidak terikat dengan salah satu blok (netral) baik komunis maupun kapitalis. Namun tetap berperan aktif dalam pergaulan Internasional dengan tetap memegang teguh tujuan nasional.

Arah kebijakan politik dan diplomasi Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno (Orde Lama) lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonialisasi dan menentang segala bentuk penjajahan. Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional, pemerintah Indonesia menggunakan strategi penggalangan kekuatan internasional dengan cara mencari dukungan dari negara-negara lain. Para diplomat Indonesia menyadari bahwa cita-cita bangsa tidak mungkin tercapai tanpa dukungan internasional.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia terus berusaha memainkan peranannya sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif. Sebagai contoh yaitu dalam usaha mencapai perdamaian dunia ketika terjadi ketegangan antara dua negara super power (Uni Soviet dan Amerika Serikat) Presiden Soekarno melancarkan politik bebas aktifnya dengan tidak memihak salah satu blok. Soekarno berpendapat bahwa untuk tercapainya perdamaian harus memfokuskan segenap perhatiannya pada isu “imperialisme dan konolialisme sebagai ancaman perdamaian dunia.” Soekarno kemudian menyatakan bahwa negara Indonesia harus bisa berdiri diatas kaki sendiri tanpa perlu bantuan negara lain untuk pembangunan nasional (Muhaimin, 2005: 172). Hal ini merupakan sebuah kebijakan politik yang diambil oleh Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno ditengah negara-negara yang baru merdeka atau sedang berkembang menerima bantuan dari negara lain yang lebih maju.

Kebijakan politik Indonesia yang sesuai dengan prinsip bebas aktifnya menghadapi ujian pada tahun 1952. Diketahui menteri luar negeri Achmad Subardjo mengadakan perjanjian bantuan militer dengan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara super power. Akibatnya, Indonesia harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan Amerika. Dengan kata lain Indonesia telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif (Kasenda, 2014: 178). Seharusnya jika Indonesia menganut prinsip bebas aktif, berarti bahwa politik luar negeri Indonesia harus menghindarkan diri dari keterikatan atas perjanjian internasional dengan salah satu blok. Keterikatan dengan salah satu negara blok dianggap akan mengganggu keseimbangan politik Indonesia sebagai satu bangsa yang bebas.

Kebijakan politik dan diplomasi Indonesia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan nasional di luar negeri serta mendorong agar badan-badan multilateral memperhatikan negara berkembang seperti negara Indonesia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan tidak memisahkan antara faktor luar negeri dengan domestik (diplomasi total). Dalam konteks total diplomasi maka tidak hanya departemen luar negeri yang menjadi pelaku diplomasi namun segenap komponen bangsa yang juga dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan luar negeri. Disinilah peranan diplomasi (soft power) menjadi sebuah penyeimbang dari kekuatan militer (hard power) untuk memperkuat stabilitas negara (Morgenthau, 2010: 169).

Militer juga berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Keikutsertaan militer Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yaitu tentang kiprah pasukan Garuda yang menuai prestasi. 167 Prajurit TNI di Haiti yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-B/MINUSTAH (*Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti*) menerima penghargaan Medali PBB. Militer Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian mampu diterima dengan baik di negara penugasan. Sejak Kontingen Garuda I bertugas di Mesir tahun 1957, maka sejak tahun itulah pasukan baret biru di bawah PBB ini mengharumkan nama bangsa hingga saat ini. Inilah salah satu peran penting angkatan perang dalam menjaga pertahanan nasional baik di dalam maupun luar negeri.

Peranan militer disini juga untuk menangkan ancaman-ancaman yang dirasa mengancam stabilitas nasional yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional dan mempertahankan stabilitas nasional (Prihantono, 2007: 67). Maka salah satu yang menjadi poin penting adalah mewujudkan hubungan sinergis antara segala komponen bangsa yang berperan dalam mempertahankan NKRI.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan pada masa pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Salah satu perubahan pada masa Soeharto ialah pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina. Kebijakan yang diambil Indonesia untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina disebabkan oleh pandangan militer (antikomunis). Militer memandang Cina sebagai pihak yang dianggap turut terlibat dalam peristiwa G30S (Suryadinata, 1998: 39).

Dari kondisi-kondisi seperti itu, dapat dilihat bahwa setelah Soeharto berkuasa Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri yang ke kiri-kirian. Hal ini tampak dari adanya dugaan keterlibatan Cina dalam upaya kudeta yang dilakukan (dituduhkan) oleh PKI yang berujung pada pengambilan kebijakan politik oleh Soeharto untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina pada tahun 1967.

6.2 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dampak dari dominasi militer dalam pemerintahan juga terasa dalam tubuh militer itu sendiri. Menurunnya profesionalisme militer terlihat dari kompetensi prajurit dan sistem pertahanan yang buruk. Peranan dominan militer melalui konsep “Jalan Tengah” yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Dwifungsi ABRI pada pemerintahan Soeharto. Konsep ini membuat profesionalisme militer yang tugas utamanya menjaga HanKam menurun. Sebab militer terlalu sibuk mengurus peran sosial-politiknya. Akan tetapi bukan berarti militer lepas tanggungjawab atas fungsi utamanya dalam bidang HanKam.

Militer tetap menjalankan fungsi Hankam demi kestabilan pertahanan dan keamanan negara. Salah satunya militer berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan yang bersifat daerah khususnya daerah-daerah yang berada diluar pulau Jawa karena menganggap pemerintah pusat tidak bisa adil. Disinilah peran

militer terlihat dalam menjaga kesatuan NKRI dengan menerapkan Undang-Undang Darurat Perang untuk mengatasi ketegangan diberbagai daerah. Selain itu juga peran militer dalam menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan negara pada awal pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dibuktikan dengan berhasilnya menumpas pemberontakan yang dikenal dengan G30S dan melakukan pembubaran terhadap partai PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan menyatakan bahwa PKI sebagai partai terlarang Indonesia.

Setelah berhasil meredam segala bentuk pemberontakan pada era orde lama. Militer di era orde baru mengadakan seminar Hankam guna tetap menjaga stabilitas nasional. Seminar Hankam yang dibuka pada tanggal 12 Nopember 1966 oleh Mayor Jenderal M.M.R. Kartakusuma, menjelaskan melalui pidato pembukaannya bahwa tujuan Seminar Hankam adalah membulatkan, mempersatukan, dan mengkompakkan seluruh ABRI secara mental, spiritual, dan materiil dengan jalan menyempurnakan dasar-dasar Hankamnas bagi penyelesaian perjuangan bangsa Indonesia. Rumusan hasil mengenai Hankamnas adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi nasional meliputi: Paham Bangsa Indonesia tentang damai dan perang, Faktor Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, Wawasan Hankam, sistem pertahanan dan keamanan nasional.
- 2) Doktrin Hankamnas, meliputi: Tujuan Hankamnas, Tugas Pokok Hankamnas, Fungsi Hankamnas, Kondisi Nasional dan Internasional, Hakekat Ancaman, Persengketaan, Dasar Politik dan Strategi Hankam, Dasar-dasar Pelaksanaan Hankam, Pembentukan Kekuatan, dan Tugas Pokok Angkatan. Berhasilnya seminar Hankam menghasilkan suatu landasan wawasan yang dikenal dengan sebutan “Wawasan Nusantara” (Pusjarah TNI jilid IV, 2000:14).

Peranan militer dalam bidang Hankam menjadi penting sebagai alat negara yang mendapat legitimasi untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional baik intern maupun ekstern. Upaya nyata itu dituangkan dalam aktualisasinya yang berupa:

- 1) Menuntaskan penyusunan perangkat perlengkapan UU No. 10 Tahun 1982 agar pembangunan dibidang Hankam secara terpadu atas dasar Hankamrata dapat diwujudkan dalam program yang operasional.

2) Menciptakan dan mendorong tumbuhnya semangat juang, rela berkorban dan semangat berlatih yang tinggi sebagai langkah awal pembentukan sumber daya komponen Hankamneg.

3) Mendorong terciptanya semangat dan tekad pada setiap lapisan masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya disiplin nasional sebagai prasyarat kemandirian menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa lain (Ranjabar dalam Yudhagama, 1995:28).

Selain seminar HanKam yang diadakan guna menjaga kestabilan nasional dalam negeri. Pemerintah juga melakukan pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan dengan Malaysia dilakukan dengan perundingan yang dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966 dengan isi perjanjian Bangkok yaitu:

1. Rakyat Sabah diberi kesempatan kembali untuk menegaskan kembali keputusan mengenai kedudukan mereka di Federasi Malaysia.
2. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik dan menghentikan permusuhan.
3. Peresmian pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia dilakukan di Jakarta yang dikenal sebagai piagam Jakarta oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak. Dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan masing-masing.

Indonesia juga memperbaiki hubungan dengan Singapura melalui perantara Habibur Rachman. Pemerintah Indonesia menyampaikan pengakuan terhadap kedaulatan negara Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 kepada Perdana Menteri. Lee Kurang Yeuw, sehingga pemerintah Singapura pun menyatakan kesediaannya untuk menjalin kembali hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.

Indonesia juga berhasil kembali menjadi anggota PBB pada 28 Desember 1966. Hal ini dikarenakan desakan dari komisi bidang pertahanan dan luar negeri dari DPR GR kepada pemerintah. Keputusan ini diambil oleh pemerintah karena menyadari akan adanya banyak manfaat yang akan diterima oleh Indonesia untuk kepentingan nasional setelah bergabung kembali menjadi anggota PBB. Keuntungan yang diperoleh ialah Indonesia dapat lebih aktif menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia dapat langsung menyampaikan gagasan dalam sidang

DK PBB. Misal jika ada suatu isu maka Indonesia dapat menyampaikan gagasan dan ide dalam sidang DK PBB secara langsung. Kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB disambut baik oleh sejumlah negara yang tergabung dalam PBB. Hal ini dibuktikan dengan penunjukan Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB pada masa sidang 1974.

Selain berhasil kembalinya menjadi anggota dan disambut baik oleh beberapa negara anggota. Akan tetapi, Indonesia sempat mengalami ketegangan dengan RRC. Pada tanggal 1 Oktober 1967 pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China (RRC). Keputusan tersebut dilakukan karena RRC dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G 30 S PKI. Bantuan tersebut seperti persenjataan-persentajaan. Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang Cina terhadap gedung kedutaan besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI. Melalui media massanya RRC telah melakukan kampanye untuk menyerang Orde Baru. Hal ini membuat pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1967 secara resmi menutup kedutaan besar di Peking.

Semenjak militer terlibat dalam politik pemerintahan. Stabilitas pertahanan dan keamanan di Indonesia sangat terjaga dilihat dari kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB serta dilakukannya pemulihan hubungan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu stabilitas pertahanan dan keamanan didalam negeri berjalan dengan baik. Militer memang memiliki keunggulan dalam menangani masalah-masalah seperti pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara maupun kriminal demi menjaga keamanan negara. Namun jika tindakan kriminal berhubungan dengan politik, maka tidak ada yang terungkap. Hal ini dapat dilihat dari kasus Marsinah, Udin, hingga terakhir pada kasus Trisakti yang menewaskan 4 Mahasiswa. Hal ini dapat membuktikan bahwa militer turut andil dalam permainan politik. Tuntutan agar Dwifungsi militer dicabut sering terdengar, banyak kalangan mengatakan bahwa militer telah menyimpang dari fungsinya sebagai alat pertahanan. Ini juga

mengakibatkan kepada penurunan profesionalisme militer karena terlalu sibuk dalam urusan politik (Fattah. 2005: 264).



BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

Latar Belakang keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998 disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) Militer berjasa dalam revolusi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-1949, (2) adanya campur tangan sipil dalam tubuh militer pada tahun 1952, (3) diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Faktor tersebut yang menjadi dasar militer untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan Indonesia. Terlebih ketika Presiden Soekarno menetapkan S.O.B guna meredakan gejolak yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuat militer secara langsung mengatur sekaligus menjalankan politik pemerintahan di Indonesia.

Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia semakin terlihat ketika konsep Nasution mengenai “Jalan Tengah” diterima oleh Presiden Soekarno. Konsep Nasution menjadi dasar pijakan militer untuk ikut berpartisipasi dalam politik pemerintahan Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan dibagi menjadi 2 periode yaitu demokrasi terpimpin pada masa Pemerintahan Soekarno pada tahun 1959 hingga tahun 1965, dan pada masa Orde Baru masa Pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Dari kedua periode itu militer masuk dalam politik pemerintahan menempati jabatan pada kabinet-kabinet, badan legislatif, serta jabatan-jabatan strategis di Indonesia.

Untuk dampak keterlibatan militer terhadap pemerintahan di Indonesia pada tahun 1958-1998 berdampak pada keadaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia. Keadaan politik dalam negeri pada waktu itu dapat dikatakan stabil karena Indonesia berhasil menjalankan demokrasi dengan dibuktikannya pemilu 1971-1997 yang dapat terselenggara. Pemilu 1971 sampai 1992 dimenangkan oleh Golkar. Hal ini menandakan militer telah berhasil dalam pembangunan dan stabilitas nasional. Keadaan politik luar negeri Indonesia memainkan peranannya sesuai dengan prinsip idealnya yang bebas aktif. Yaitu dengan tidak memihak salah satu blok (netral) Namun tetap berperan aktif dalam pergaulan Internasional. Indonesia pada masa Soeharto mengambil kebijakan politik dengan memutuskan hubungan diplomasi dengan Cina pada tahun 1967. Kebijakan ini diambil karena adanya dugaan Cina terlibat dalam usaha kudeta

dalam peristiwa G30S. Dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia militer menjadi elemen yang penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara (HanKam).

7.2 Saran

Beberapa saran yang diberikan penulis kepada para pembaca, di antaranya ialah:

1. Bagi Pemerintah maupun Golongan militer
Peristiwa yang terjadi antara elite politik (sipil) dengan golongan militer dapat menjadi pembelajaran bahwa suatu perebutan kursi kekuasaan atau jabatan dapat berdampak terhadap kestabilan politik nasional serta kestabilan pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga militer yang pada dasarnya berfungsi untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara jika dilibatkan dalam urusan sipil akan sangat berpengaruh hasil dari keputusan dan perkembangan politik negara. Maka dari itu sudah sewajarnya jika para elite sipil dan militer bersama-sama untuk mengembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepada pembaca, semoga tulisan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1969-2000, dan dapat mengambil nilai-nilai yang baik dalam hal politik dan kepemimpinan.
3. Bagi Almamater
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan sebagai bentuk perwujudan tugas Universitas Jember yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdurahkman, dkk. 2018. *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bakti, I. Nusa. 2000. *Hubungan Baru Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas.
- Baskara. T. Wardayana. 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.
- Baskara. T. Wardayana. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV*. Jakarta: Gunung Agung.
- Marbun, B. N. 1992. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irawanto, B. 2017. *Film, Ideologi, dan Militer*. Yogyakarta: Media pressindo.
- Croissant, 2003. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Crouch, H. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Duverger. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatah, E.S. 1994. *Masalah Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Fatta., Abdoel. 2005. *Dimiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Yogyakarta: LKIS
- Feith. H. 1995. *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gongong, Anhar. 2005. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Huntington, 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karma, M. 2001. *Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi Sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, M. R. 1989. *Peranan ABRI dan Politik*. Jakarta: Haji Masagung.
- Kasenda, P. 2014. *Bung Karno Panglima Revolusi*. Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FHUII.
- M. Pangabean, 1993. *Berjuang dan Mengabdikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Morgenthau, H. J. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhaimin, Y. 2005. *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: UGM Press.

- Nasution A. H. 1983. *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, A. H. 1954. *Politik Militer Indonesia*. Djakarta: Petjetakan Perdana.
- Notosusanto, N. 1985. *Pejuang dan Prajurit, Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Pusjarah dan Tradisi TNI. 2000. *Sejarah TNI Jilid I – V*. Jakarta: Mabes TNI
- Prihantono, H., Dkk. 2007. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.
- Ranjabar, J. 1995. *ABRI Sebagai Kekuatan Sosial Politik Dalam Era Globalisasi*. Dalam Yudhagama No. 49 Hal: 15-28. Dikenal AD
- Samego, I. 1998. *Bila ABRI Menghendaki*. Bandung: Mizan.
- Samego, I. 1998. *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Eletisme dalam Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Sjarif, A. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sing, Bilveer, 1995. *Dwifungsi ABRI Asal Usul; Aktualisasi Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembngunan*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Soebijono., dkk. 1992. *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sukma, R. 1999. *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Sundhahussen, ULF. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.

- Suryadinata, L. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto*. Jakarta: LP3ES
- Affairs, P., Columbia, B., Affairs, P., & Columbia, B. (2014). Politics Under Military Indonesia ' s New Order, *45(2)*, 206–219.
- Bhakti, I. N., Yanuarti, S., & Nurhasim, M. (2009). Military Politics , Ethnicity and Conflict in Indonesia, (62).
- Efendi, D., Yogyakarta, U. M., & Alam, M. (2018). Indonesia In the post-soeharto era : IdentIfyIng state IdeologIcal typology, (February).
- Mietzner, M. (n.d.). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia : Elite Conflict , Nationalism , and Institutional Resistance*.
- Sciences, P., West, B., Indonesia, J., & Sciences, P. (2017). Professionalism in the Post Soeharto Indonesian Military, *10(5)*.
- Lantik, A. 2014. *Dwifungsi ABRI: Legalisasi Kekuasaan Golongan Militer dalam Pemerintahan Orde Baru*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Juliani, E. 2008. *Militer dan Politik (Studi Tentang Kelompok Pendukung dan Penentang Terhadap Penghapusan Dwifungsi ABRI tahun 1998-2001)*” Universita Sumatera Utara.
- Kamil, H. N. 2009. *Militer dan Kekuatan Politik: Studi Tentang Keterlibatan TNI Dalam Perpolitikan di Indonesia 1945-1998*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rikan, K. 2014. *Konsep Dwifungsi ABRI dan Perannya*. Universitas PGRI Yogyakarta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS PENELITIAN

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	PERMASALAHAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	
Sejarah Nasional Indonesia	Intervensi dalam Pemerintahan Indonesia 1969-2000	Militer Politik di Tahun 1969-2000 b. Sifat Penelitian - Penelitian Kepustakaan (Studi Literatur	a. Jenis Penelitian: - Penelitian Sejarah b. Sifat Penelitian - Penelitian Kepustakaan (Studi Literatur	a. Bagaimana Latar Belakang Intervensi Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia 1969-2000? b. Bagaimana Bentuk Intervensi Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia 1969-2000? c. Bagaimana Dampak Intervensi Militer terhadap Pemerintahan di Indonesia 1969-2000?	a. Sumber Primer (Buku Pokok) b. Sumber Sekunder (Buku Penunjang) c. Dokumen dan Jurnal Ilmiah	Metode Penelitian dengan langkah-langkah: - Heuristik - Kritik - Interpretasi - Historiografi Pendekatan: - Sosiologi Politik Teori: - Hubungan Sipil Militer

LAMPIRAN 2. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET DWIKORA

No.	Jabatan	Nama
1	Wakil Perdana Menteri I	Dr. Subandrio
2	Wakil Perdana Menteri II	Dr. Johannes Leimena
3	Wakil Perdana Menteri III	Chaerul Saleh
4	Meteri Koordinaor Pelaksanan Ekonomi Terpimpin	Adam Malik
5	Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo
6	Menteri Negara	Oei Tjoe Tat, SH
7	Menteri Negara	Njoto
8	Menteri Negara	Arifin Harahap, SH
9	Menteri Negara	Brigjen Moedoko Koesoemodirdjo
10	Menteri Negara	Brigjen Drs. Achmad Sukendro
11	Menteri Negara	Kolonel Drs. Boegi Soepeno
12	Menteri ESDM	Mayjen Dr. Ibnu Sutowo
13	Menteri Negara	H. Aminuddin Azis
14	Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional	Dr. Suharto
15	Menteri/Ketua BPK	Sri Sultan Hamengkubuwono IX
16	Menteri Luar Negeri	Dr. Subandrio
17	Menteri koordinator	Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H
18	Menteri Dalam Negeri	Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo
19	Menteri Kehakiman	Astrawinata S.H.
20	Menteri/Ketua Mahkamah Agung	Projodikoro S.H.
21	Menteri/Jaksa Agung	Brigjen TNI A. Soethardio

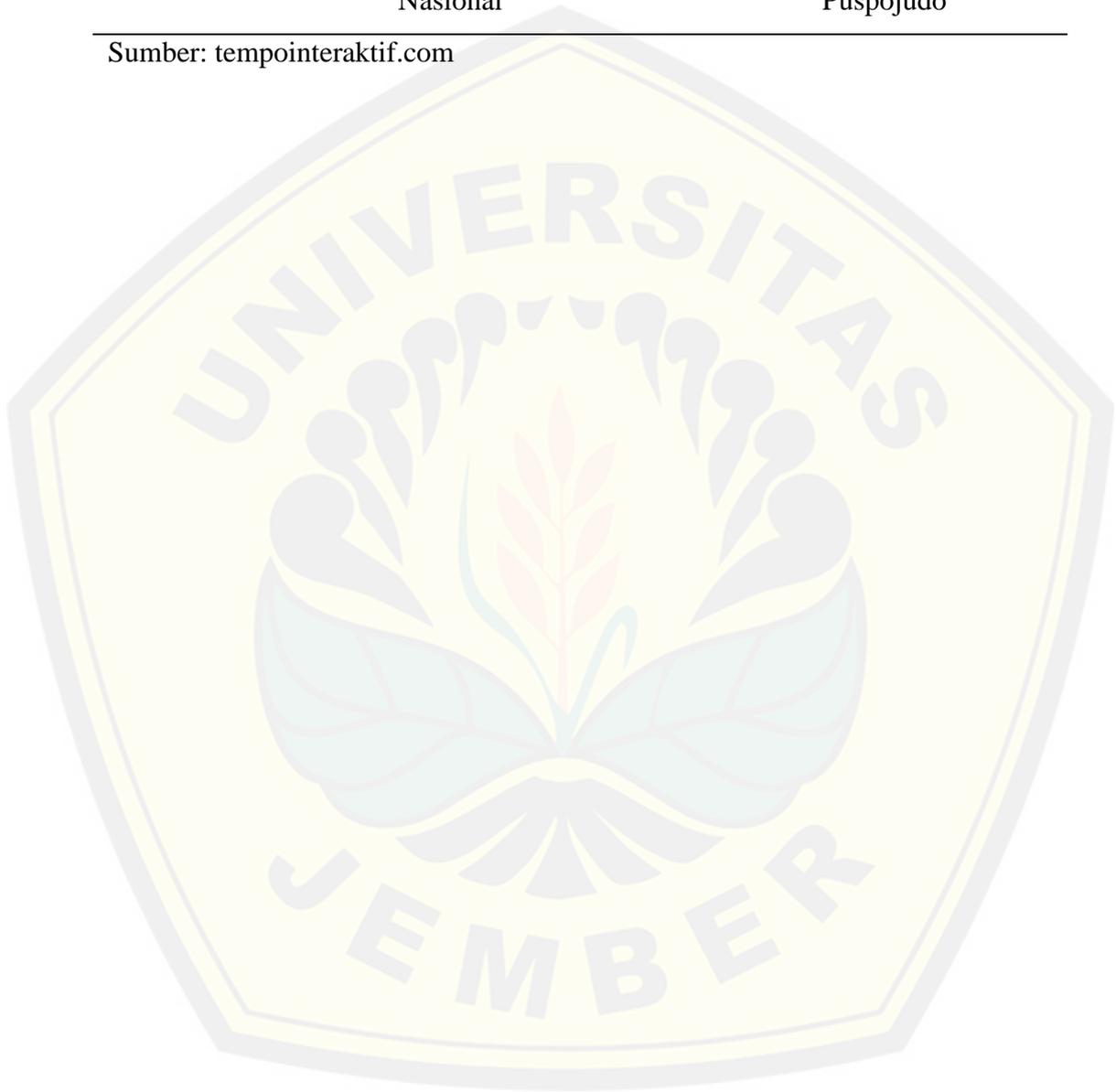
22	Menteri Pertahanan dan Keamanan	Jenderal TNI Abdul Haris Nasution
23	Menteri/Panglima Angkatan Darat	Letjen TNI Achmad Yani (sampai dengan 1 Oktober 1965), Mayjen TNI Pranoto Reksosamodra (3-16 Oktober 1965), Mayjen TNI Soeharto (sejak 16 Oktober 1965)
24	Menteri/Panglima Angkatan Laut	Laksdya (Laut) R.E. Martadinata
25	Menteri/Panglima Angkatan Udara	Sri Mulyono Herlambang
26	Menteri/ Panglima Kepolisian	Insp Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo
27	Menteri Urusan Bank	Sumarno S.H.
28	Menteri/Gubernur Bank Indonesia	Jusuf Muda Dalam
29	Menteri Urusan Anggaran Negara	Drs. Surjadi
30	Menteri Iuran Negara	Brigjen (Pol) Drs. Hoegeng Imam Santoso
31	Menteri Urusan Perasuransian	Sutjipto Amidharmo
32	Menteri Urusan Pembangunan	Dr. Chaerul Saleh
33	Menteri penertiban Bank dan Modal Swasta	J.D. Massie
34	Menteri Perburuhan	Sutomo
35	Menteri Urusan Research Nasional	Prof. Dr. Sudjono Djuned Pusponegoro
36	Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi	Dr. Chaerul Saleh
37	Menteri Pertambangan	Armunanto
38	Menteri Perindustrian	Hadi Thayeb
39	Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi	Mayjen TNI Sarbini
40	Menteri Pertanian	Sadjarwo S.H.

41	Menteri Perkebunan	Drs. Frans Seda
42	Menteri Kehutanan	Soedjarwo
43	Menteri Agraria	R. Hemanses S.H.
44	Menteri Pembangunan Masyarakat Desa	Ipi Gandamana
45	Menteri Pengairan	Ir. Surachman
46	Menteri Perpajakan Umum dan Tenaga	Mayjen TNI Suprayogi
47	Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan	Ir. Setiadi Reksoprodjo
48	Menteri Pengairan Dasar	Ir. P.C Harjasudirdja
49	Menteri Binamarga	Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo
50	Menteri Ciptakarya dan Kontruksi	David Gee Cheng
51	Menteri Jalan Raya Sumatera	Ir. Bratanata
52	Menteri Pekerjaan Umum	Ir. Sutami
53	Menteri Perindustrian Rakyat	Mayjen TNI Dr. Azis Saleh
54	Menteri Perindustrian Dasar	Hadi Thayeb
55	Menteri Perindustrian Ringan	Brigjen TNI Muhammad Jusuf
56	Menteri Perindustrian Tekstil	Brigjen TNI Ashari Danudirjo
57	Menteri Perindustrian Kerajinan	Mayjen TNI Dr. Azis Saleh
58	Menteri Perindustrian Rakyat Untuk Berdikari	T.D. Pardede
59	Menteri Koordinator Distribusi	Dr. J. Leimenera
60	Menteri Perdagangan Dalam Negeri	Brigjen TNI Achmad Jusuf
61	Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata	Letjen TNI Hidayat
62	Menteri Perhubungan Udara	Partono
63	Menteri Tranmigrasi dan Koperasi	Drs. Achadi
64	Menteri Koordinator Maritim (Perhubungan Laut)	Mayjen Ali Sakidin
65	Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut	Laksda Hamzah

		Atmohandojo
66	Menteri Perindustrian Maritim	Mardanus
67	Menteri Kesejahteraan	H. Muljadi Djojomartono
68	Menteri Sosial	Ny. Rusiah Sardjono S.H
69	Menteri Kesehatan	Mayjen TNI Prof. Dr. Satrio
70	Menteri Agama	Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
71	Menteri Urusan Haji	Prof. K.H. Farid Ma'ruf
72	Menteri Urusan Perhubungan Pemerintah dengan Alim Ulama	K.H. Muh. Ilyas
73	Menteri Koordinator Kompartimen Agama	K.H. Fattah Jasin
74	Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan	Prof. Dr. Prijono
75	Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	Ny. Artati Marzuki Sudirdjo
76	Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan	Brigjen TNI Dr. Syarif Thayeb
77	Menteri Olahraga	Maladi
78	Menteri Perhubungan dengan Rakyat	Dr. Roeslan Abdulgani
79	Menteri Penerangan	Mayjen TNI Achmadi
80	Menteri Perhubungan MPR/DPR/DPA/Front Nasional	Ds. W.J Rumambi
81	Menteri/Sekjen Front Nasioanal	Sudibyoy
82	Menteri Urusan Pengerahan Dana dan Kekuatan	Notohamiprodjo
83	Menteri Negara diperbantukan pada Presiden	Prof. Iwa Kusuma Sumantri, S.H.
84	Menteri/Penasehat Militer Presiden	Laks. (Udara) Suryadi Suryadarma
85	Menteri/Penasehat Presiden Urusan dalam Negeri	Jend. (Pol) Sukarno Djojonegoro
86	Menteri/Penasehat Presiden Urusan	Komjen (Pol) Sunarto

	Kepolisian	
87	Menteri Negara diperbantukan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata	Laksda H. Sri Mulyono Herlambang
88	Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional	Mayjen TNI Wilujo Puspojudo

Sumber: tempointeraktif.com

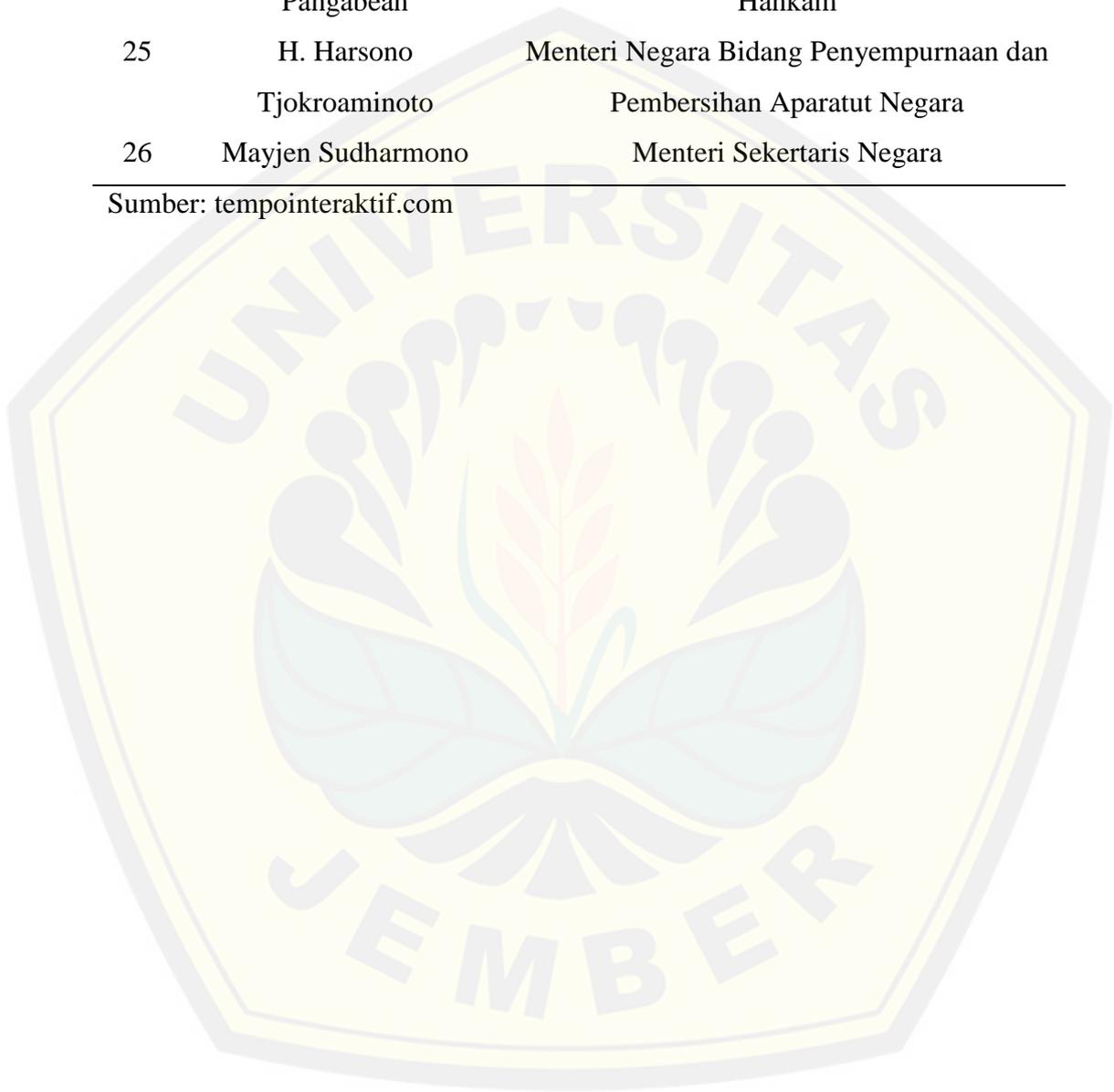


**LAMPIRAN 3. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN I**

No.	NAMA	JABATAN
1	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri
2	KH. Dr. Idham Chalid	Menteri Kesejahteraan Rakyat
3	Mayjen Basuki Rahmat	Menteri Dalam Negeri
4	Adam Malik	Menteri Luar Negeri
5	Jenderal Soeharto	Menteri Pertahanan dan Keamanan
6	Prof. Oemar Senoadji, S.H.	Menteri Kehakiman
7	Laksda Boediarjo	Menteri Penarangan
8	Prof. Dr. Ali Wardhana	Menteri Keuangan
9	Prof. Dr. Sumitro	Menteri Perdagangan
10	Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwijaya	Menteri Pertanian
11	Letjen M. Jusuf	Menteri Perindustrian
12	Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro	Menteri Pertambangan
13	Dr. Ir. Sutami	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
14	Drs. Frans Seda	Menteri Perhubungan
15	Mashuri Shaleh	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
16	Prof. Dr. G.A. Siwabesy	Menteri Kesehatan
17	KH. Muhammad Dahlan	Menteri Agama
18	Laksda Mursalin	Menteri Tenaga Kerja
19	Letjen H. Sabrini	Menteri Transmigrasi & Koperasi
20	Dr. AM Tambunan, SH	Menteri Sosial
21	Sunawar Sukowati	Menteri Negara Bidang Pengawasan Operasi Pembangunan
22	Prof. Dr. Widjojo	Menteri Negara Bidang Pengawasan

	Nitisastro	Proyek-proyek
23	H. MS Mintaredja, SH	Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA
24	Brigjen TNI Maraden Pangabean	Menteri Negara Pembantu Penertiban Hankam
25	H. Harsono Tjokroaminoto	Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatut Negara
26	Mayjen Sudharmono	Menteri Sekertaris Negara

Sumber: tempointeraktif.com

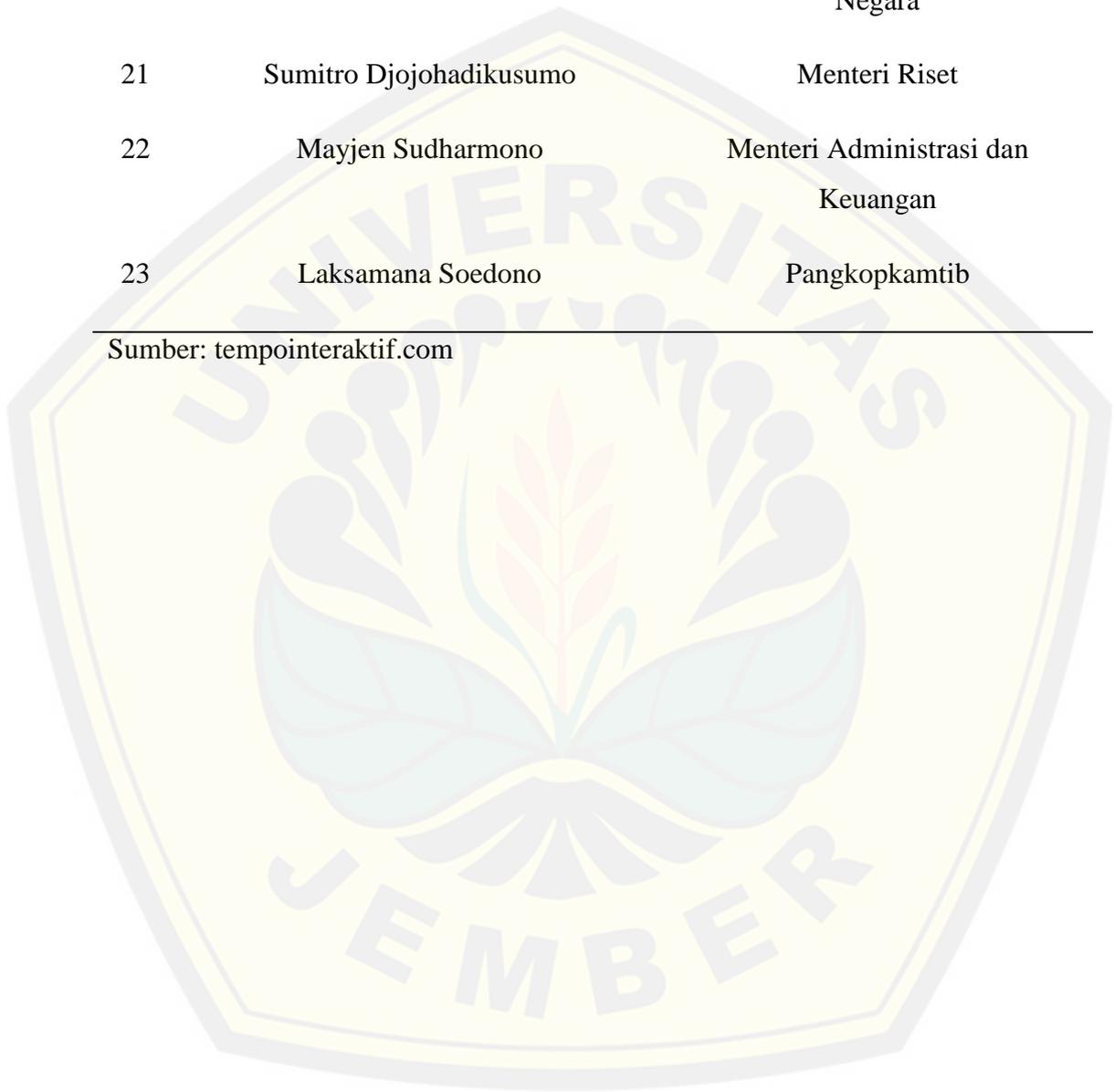


**LAMPIRAN 4. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN II**

No.	NAMA	JABATAN
1	Amir Machmud	Menteri Dalam Negeri
2	Adam Malik	Menteri Luar Negeri
3	Mayjen Maraden Pangabean	Menteri Pertahanan dan Keamanan
4	Oemar Senoadji	Menteri Kehakiman
5	Mayjen Sudharmono	Menteri Penerangan
6	M. Jusuf	Menteri Perindustrian
7	Radius Prawiro	Menteri Perdagangan
8	Abdul Mukti Ali	Menteri Agama
9	Ali Wardhana	Menteri Keuangan
10	Mohammad Sadii	Menteri Pertambangan
11	Thoyib Hadiwijaya	Menteri Pertanian
12	Sutami	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Litrik
13	Emil Salim	Menteri Perhubungan
14	Sumantri Brodjonegoro	Mendikbud
15	G.A. Siwabessy	Menteri Kesehatan
16	M.S. Mintaredja	Menteri Sosial
17	Mayjen Subroto	Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi

18	Widjojo Nitisastro	Menteri Negara Ekonomi dan Keuangan
19	Sunawar Sukowati	Menteri Kesejahteraan Rakyat
20	J.B. Sumarlin	Menteri Penertiban Aperatur Negara
21	Sumitro Djojohadikusumo	Menteri Riset
22	Mayjen Sudharmono	Menteri Administrasi dan Keuangan
23	Laksamana Soedono	Pangkopkamtib

Sumber: tempointeraktif.com



**LAMPIRAN 5. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN III**

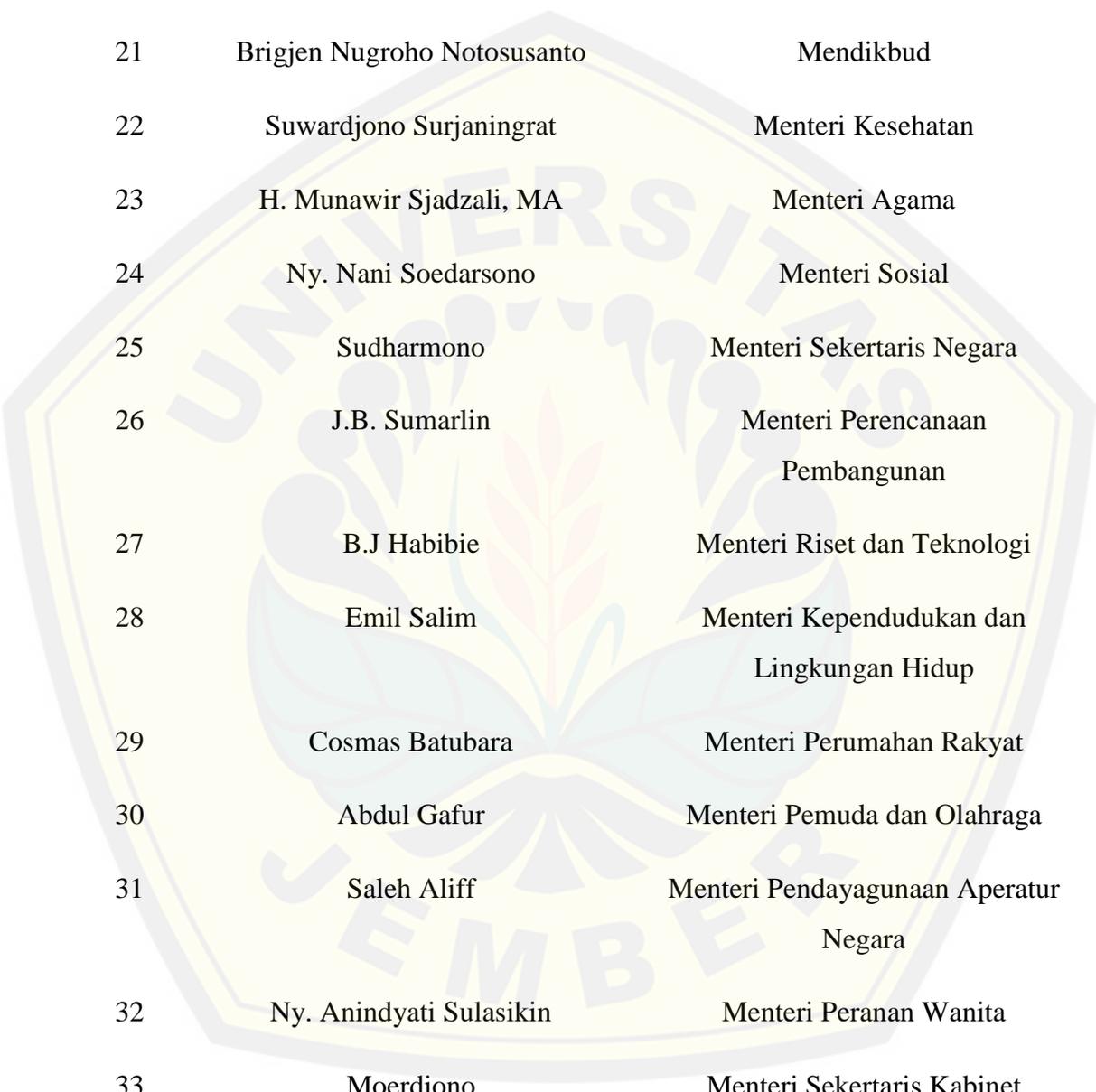
No.	NAMA	JABATAN
1	Maraden Pangabean	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	Widjojo Nitisastro	Menteri Ekonomi dan Keuangan
3	Surono	Menteri Kesejahteraan Rakyat
4	Amir Machmud	Menteri Dalam Negeri
5	Jend.TNI M. Jusuf	Menteri Pertahanan dan Keamanan
6	Mochtar Kusumaatmadja	Menteri Luar Negeri
7	Moedjono	Menteri Kehakiman
8	Ali Moertopo	Menteri Penerangan
9	Ali Wardhana	Menteri Keuangan
10	Radius Prawiro	Menteri Perdagangan dan Kooperasi
11	Soedarsono Hadisapoetro	Menteri Pertanian
12	A.R. Soehoed	Menteri Perindustrian
13	Mayjen Subroto	Menteri Pertambangan dan Energi
14	Daoed Joesoef	Mendikbud
15	Rusmin Nurjadin	Menteri Perhubungan
16	Purnomosidi Hadisaroso	Menteri Pekerjaan Umum
17	Soewardjono Surjaningrat	Menteri Kesehatan

18	Alamsyah Ratu	Menteri Agama
19	Sapardjo	Menteri Sosial
20	Harun Zain	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	J.B. Sudirman	Menteri Penetapan Aparatur Negara
22	Emil Salim	Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
23	BJ.Habibie	Menteri Riset dan Teknologi
24	Sudharmono	Menteri Sekretaris Negara

Sumber: tempointeraktif.com

**LAMPIRAN 6. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN IV**

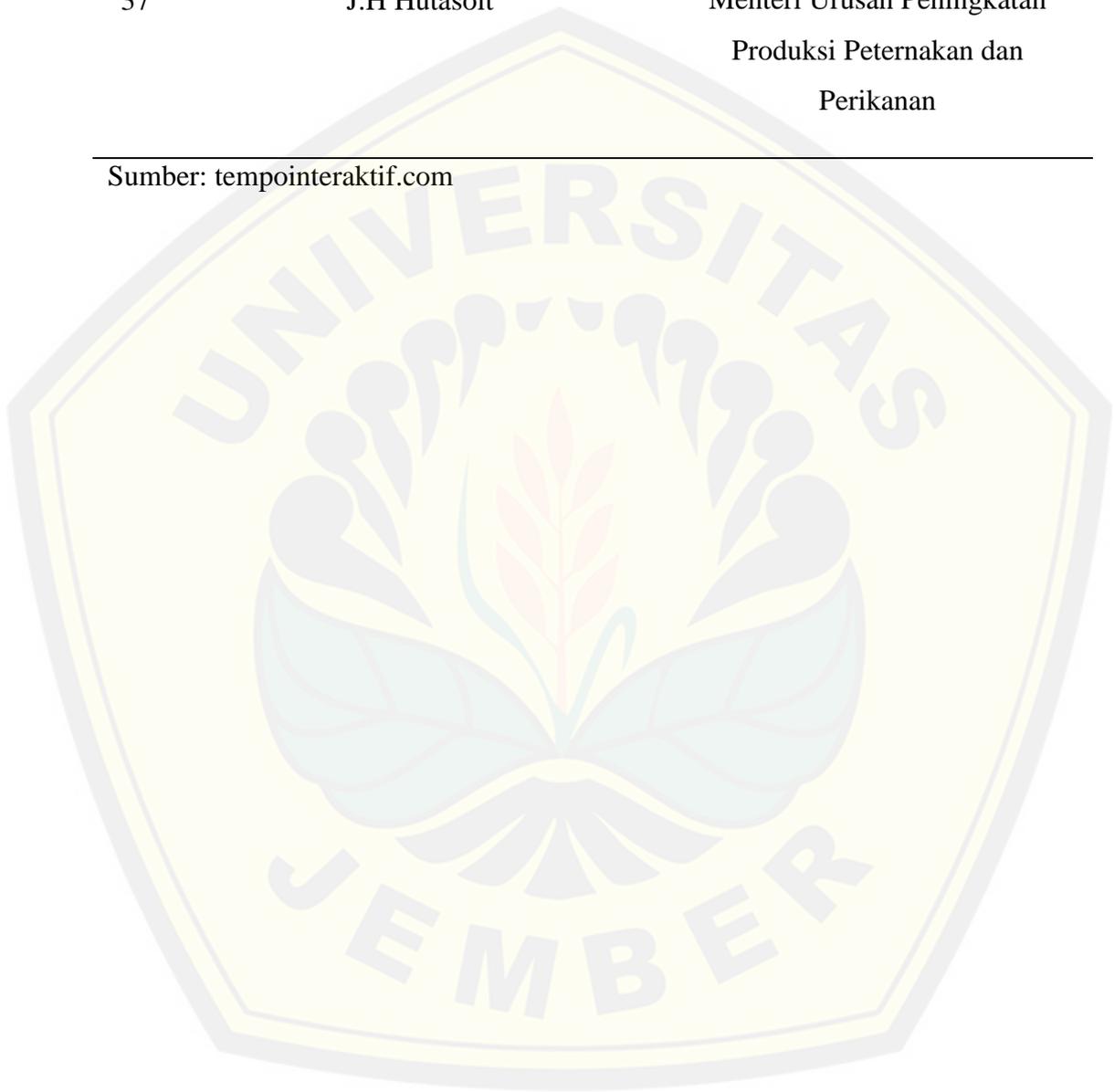
No.	NAMA	JABATAN
1	Mayjen Surono Reksodimedjo	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Pertahanan
2	AliWardhana	Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan
3	Alamsyah Ratu	Menteri Kesejahteraan Rakyat
4	Soepardjo Roestam	Menteri Dalam Negeri
5	Mochtar Kusumaatmadja	Menteri Luar Negeri
6	Mayjen S. Poniman	Menteri Pertahanan dan Keamanan
7	Ali Said	MenteriKehakiman
8	Harmoko	Menteri Penerangan
9	Radius Prawiro	Menteri Keuangan
10	Rachmat Saleh	Menteri Perdagangan
11	Bustanil Arifin	Menteri Koperasi
12	Achmad Affandi	Menteri Pertanian
13	Soedarwo	Menteri Kehutanan
14	Hartato	Menteri Perindustrian
15	Mayjen Subroto	Menteri Pertambangan dan Energi
16	Suyono Sosrodarsono	Menteri Pekerjaan Umum



17	Rusmin Nuryadin	Menteri Perhubungan
18	Mayjen Achmad Thahir	Menteri Pariwisata
19	Laksamana Sudomo	Menteri Tenaga Kerja
20	Martono	Menteri Transmigrasi
21	Brigjen Nugroho Notosusanto	Mendikbud
22	Suwardjono Surjaningrat	Menteri Kesehatan
23	H. Munawir Sjadzali, MA	Menteri Agama
24	Ny. Nani Soedarsono	Menteri Sosial
25	Sudharmono	Menteri Sekretaris Negara
26	J.B. Sumarlin	Menteri Perencanaan Pembangunan
27	B.J Habibie	Menteri Riset dan Teknologi
28	Emil Salim	Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
29	Cosmas Batubara	Menteri Perumahan Rakyat
30	Abdul Gafur	Menteri Pemuda dan Olahraga
31	Saleh Aliff	Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara
32	Ny. Anindyati Sulasikin	Menteri Peranan Wanita
33	Moerdiono	Menteri Sekretaris Kabinet
34	Ginandjar Kartasasmita	Menteri Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

35	Wardojo	Menteri Urusan Peningkatan Produksi Pangan
36	Hasjrul harahap	Menteri Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras
37	J.H Hutasoit	Menteri Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan

Sumber: tempointeraktif.com



**LAMPIRAN 7. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN V**

No.	NAMA	JABATAN
1	Rudini	Menteri Dalam Negeri
2	Ali Alatas	Menteri Luar Negeri
3	L.B. Moerdani	Menteri Pertahanan dan Keamanan
4	Ismail Saleh	Menteri Kehakiman
5	Harmoko	Menteri Penerangan
6	J.B. Sumarlin	Menteri Keuangan
7	Arifin Siregar	Menteri Perdagangan
8	Hartato Sastrosoenarto	Menteri Perindustrian
9	Wardoyo	Menteri Pertanian
10	Ginandjar Kartasasmita	Menteri Pertambangan dan Energi
11	Hasjrul Harahap	Menteri Kehutanan
12	Radinal Mochtar	Menteri Pekerjaan Umum
13	Azwar Anas	Menteri Perhubungan
14	Bustanil Arifin	Menteri Koperasi
15	Cosmas Batubara	Menteri Tenaga Kerja
16	Soegiarto	Menteri Transmigrasi
17	Soesilo Soedarman	Menteri Pariwisata
18	Fuad Hassan	Mendikbud
19	Adhyatma	Menteri Kesehatan



20	Munawir Sjadzali	Menteri Agama
21	Haryati Soebadio	Menteri Sosial
22	Sudomo	Menteri Bidang Politik dan Pertahanan
23	Radius Prawiro	Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan
24	Soepardjo Rustam	Menteri Kesejahteraan Rakyat
25	Moerdiono	Menteri Sekretaris Negara
26	Saleh Afiff	Menteri Perencanaan Pembangunan
27	B.J. Habibe	Menteri Riset dan Teknologi
28	Emil Salim	Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
29	Siswono Yudo Husodo	Menteri Perumahan Rakyat
30	Akbar Tanjung	Menteri Pemuda dan Olahraga
31	Sarwono Kusumaatmadja	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
32	A. Sulasikin Murpratomo	Menteri Urusan Peranan Wanita
33	Saadilah Mursjid	Menteri Sekretaris Kabinet
34	Nasrudin Sumintapura	Menteri Keuangan
35	Sooedradjad Djiwandono	Menteri Perdagangan
36	Tungki Ariwibowo	Menteri Perindustrian
37	Sjarifuddin Baharsjah	Menteri Pertanian

38

Bernadus Sugiarta Muljana

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional

Sumber: tempointeraktif.com



**LAMPIRAN 8. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN VI**

No.	NAMA	JABATAN
1	Saleh Afiff	Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan
2	Hartarto Sastrosoenarto	Menteri Bidang Industri dan Perdagangan
3	Soesilo Soedarman	Menteri Bidang Politik dan Pertahanan
4	Azwar Anas	Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat
5	Yoegi Suardi Memet	Menteri Dalam Negeri
6	Ali Alatas	Menteri Luar Negeri
7	Jenderal Edi Sudrajat	Menteri Pertahanan Keamanan
8	Oetojo Oesma	Menteri Kehakiman
9	Harmoko	Menteri Penerangan
10	Mae'ie Muhammad	Menteri Keuangan
11	Satrio Budihardjo	Menteri Perdagangan
12	Tungki Ariwibowo	Menteri Perindustrian
13	Sjarifuddin Baharsjah	Menteri Pertanian
14	Ida Bagus Sudjana	Menteri Pertambangan dan Energi
15	Djamaloedin Soeryohadikoemo	Menteri Kehutanan
16	Radinal Mochtar	Menteri Pekerjaan Umum



17	Haryanto Dhanutirto	Menteri Perhubungan
18	Joop Ave	Menteri Pariwisata
19	Subiakto Tjakrawerdaya	Menteri Koperasi
20	Abdul Latief	Menteri Tenaga Kerja
21	Siswono Yudo Husodo	Menteri Transmigrasi
22	Wardiman Djojonegoro	Mendikbud
23	Sujudi	Menteri Kesehatan
24	Tarmizi Taher	Menteri Agama
25	Endang Kusuma Inten Soeweno	Menteri Sosial
26	Moerdiono	Menteri Sekretaris Negara
27	Saadillah Mursjid	Menteri Sekretaris Kabinet
28	Ginandjar Kartasasmita	Menteri Perencanaan Pembangunan
29	B.J. Habibie	Menteri Riset dan Teknologi
30	Ibrahim Hassan	Menteri Urusan Pangan
31	Haryono Suyono	Menteri Kependudukan
32	Sanyoto Sastrowardoyo	Menteri Penggerak Dana Investasi
33	Soni Harsonoo	Menteri Agraria
34	Akbar Tanjung	Menteri Perumahan Rakyat
35	Sarwono Kusumaatmadja	Menteri Lingkungan Hidup
36	Mien Sugandhi	Menteri Urusan Peranan Wanita
37	Haryono Isman	Menteri Pemuda dan Olahraga

38

T.B. Silalahi

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara

39

Harmoko

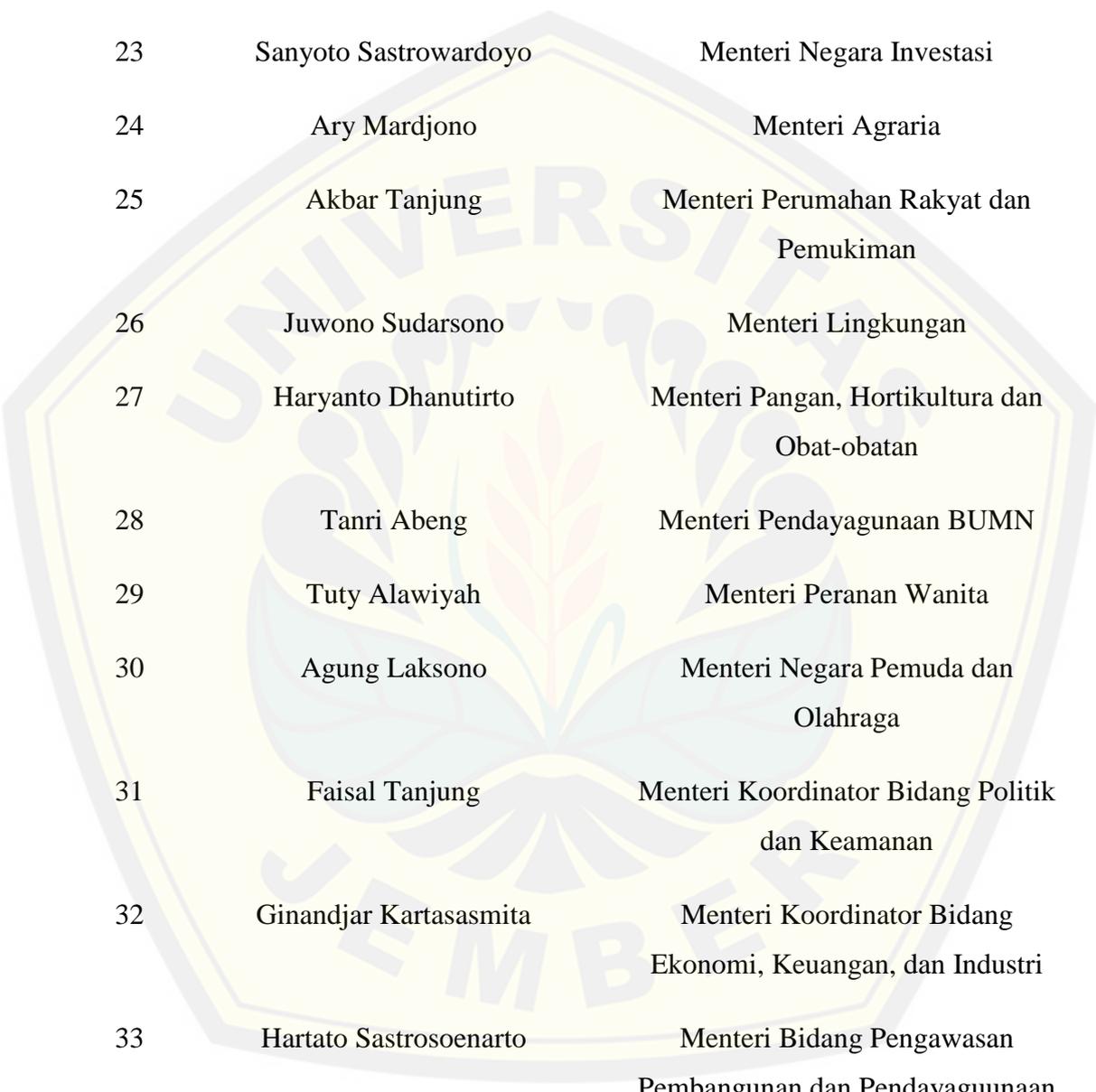
Menteri Urusan Negara

Sumber: tempointeraktif.com



**LAMPIRAN 9. ANGGOTA-ANGGOTA DALAM KABINET
PEMBANGUNAN VII**

No.	NAMA	JABATAN
1	R. Hartono	Menteri Dalam Negeri
2	Ali Alatas	Menteri Luar Negeri
3	Mayjen Wiranto	Menteri Pertahanan dan Keamanan
4	Muladi	Menteri Kehakiman
5	Muhammad Alwi Dahlan	Menteri Penerangan
6	Fuad Bawazier	Menteri Keuangan
7	Mohammad Hasan	Menteri Perindustrian dan Perdagangan
8	Justika Baharsjah	Menteri Pertanian
9	Kuntoro Mangkusubroto	Menteri Pertambangan dan Energi
10	Sumahadi	Menteri Kehutanan dan Perkebunan
11	Rachmadi Bambang Sumadhijo	Menteri Pekerjaan Umum
12	Giri Suseno Hadihardjono	Menteri Perhubungan
13	Abdul Latief	Menteri Pariwisata
14	Subiakto Tjakrawerdaya	Menteri Koperasi
15	Theo L. Sambuaga	Menteri Tenaga Kerja
16	Hendropriyono	Menteri Transmigrasi
17	Wiranto Arismunandar	Mendikbud
18	Faried Anfasa	Menteri Kesehatan



19	Muhammad Quraish Shihab	Menteri Agama
20	Siti Hardijanti Rukmana	Menteri Sosial
21	Saadillah Mursjid	Menteri Sekretaris Negara
22	Rahardi Ramelan	Menteri Riset dan Teknologi
23	Sanyoto Sastrowardoyo	Menteri Negara Investasi
24	Ary Mardjono	Menteri Agraria
25	Akbar Tanjung	Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman
26	Juwono Sudarsono	Menteri Lingkungan
27	Haryanto Dhanutirto	Menteri Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan
28	Tanri Abeng	Menteri Pendayagunaan BUMN
29	Tuty Alawiyah	Menteri Peranan Wanita
30	Agung Laksono	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
31	Faisal Tanjung	Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
32	Ginandjar Kartasasmita	Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
33	Hartato Sastrosoenarto	Menteri Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayaguunaan
34	Haryono Suyono	Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan